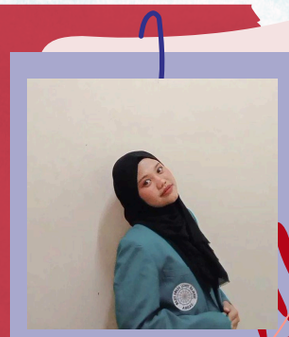
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bukan hanya lembaga politik, tetapi juga simbol dari kekuatan demokrasi bangsa. Di balik tembok-tembok kokoh Gedung Nusantara, para wakil rakyat berdiskusi, berdebat, dan merumuskan masa depan Indonesia. Dalam setiap sidang, terdapat perpaduan ide besar, perbedaan tajam, dan kepentingan beragam yang saling bersaing, menciptakan dinamika politik yang kaya dan penuh warna.

DPR RI adalah panggung tempat politik bertemu dengan realitas, di mana keputusan besar dibuat melalui proses panjang negosiasi, diplomasi, dan terkadang pertarungan sengit antarfraksi. Setiap langkah dalam proses legislasi mengandung kisah perjuangan politik yang mencerminkan wajah bangsa yang beragam. Berada di dalamnya memberikan pengalaman tak ternilai—melihat langsung bagaimana kebijakan nasional dibentuk, disusun, dan diperdebatkan, dengan setiap tindakan memiliki implikasi yang luas bagi kehidupan masyarakat.

Azizah Amanuroh, kerap disapa ziza/zizee. Lahir di Blitar, 2002. Seorang mahasiswi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang memiliki ketertarikan dalam memahami dinamika politik dan pendidikan. Dengan semangat yang membara, berusaha berkomitmen untuk menjelajahi ide-ide inovatif yang dapat menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat.



Terima Kasih Kepada:

STAI SADRA

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

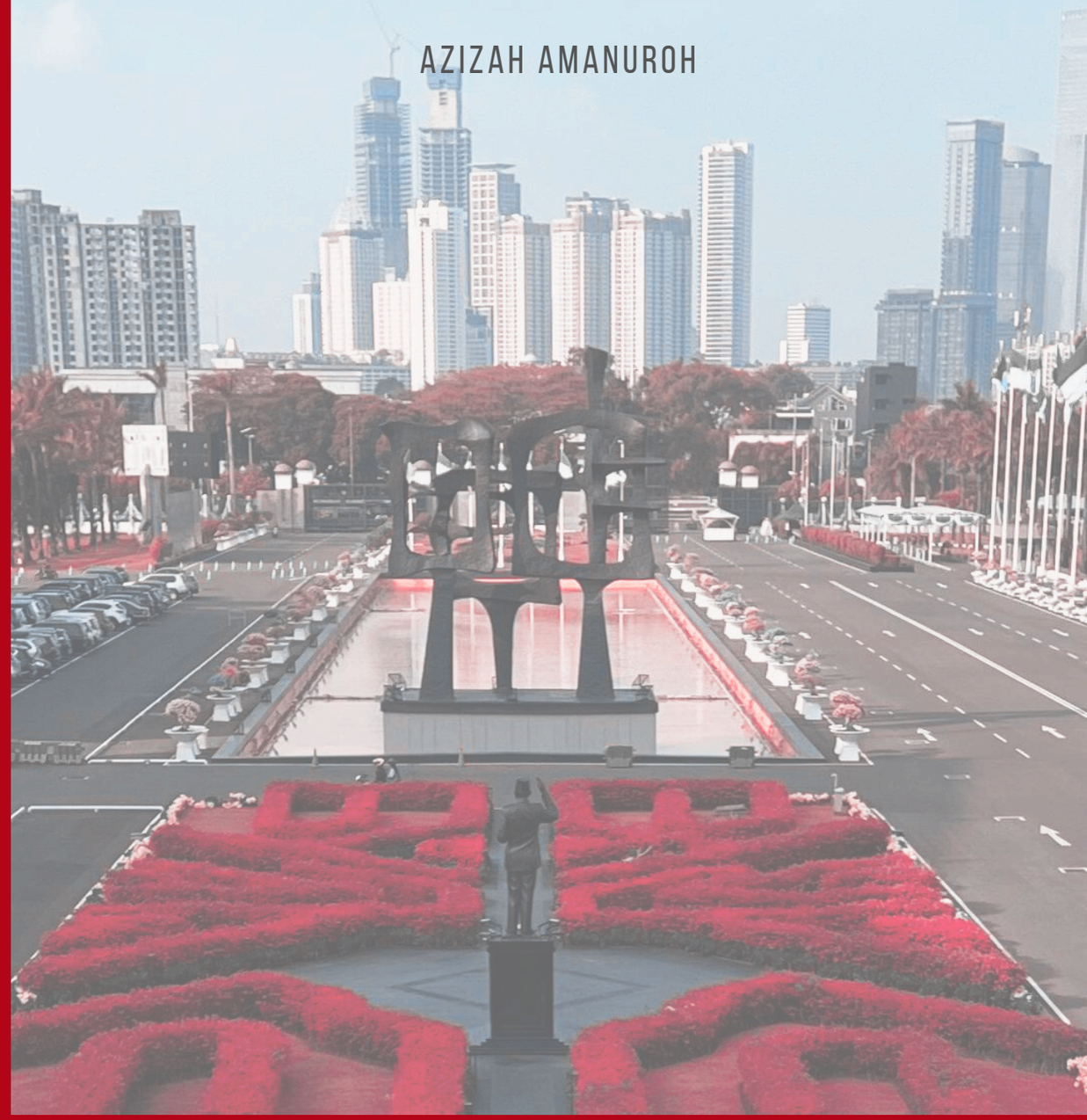
Praktik Profesi Mahasiswa

Tahun Ajaran 2023/2024

AZIZAH AMANUROH

DINAMIKA POLITIK DPR RI DALAM PERSPEKTIF ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

AZIZAH AMANUROH



Laporan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

DINAMIKA POLITIK DPR RI DALAM PERSPEKTIF ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Disusun Oleh:

Azizah Amanuroh

21.10.1.111.004

Pembimbing:

Zaenal Abidin, M.Ud.

Laporan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) ini Disusun sebagai Persyaratan Memperoleh Nilai PPM

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA

JAKARTA

2023/2024

LEMBAR PENGESAHAN
SIDANG LAPORAN PRAKTIK PROFESI MAHASISWA (PPM)
STAI SADRA

Laporan PPM ini disusun oleh:

Nama : Azizah Amanuroh
NIM : 21.10.1.111.004
Prodi : S1 (Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)
Judul : Dinamika Politik DPR RI dalam Perspektif Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah disahkan oleh dewan sidang:

(Nano Warno, Ph.D)
Ketua/Penguji Tanggal: **(Nano Warno, Ph.D)**

(Zaenal Abidin, M.Ud)
Penguji Tanggal: **(Zaenal Abidin, M.Ud)**

(Basrir Hamdani, Ph.D)
Sekretaris Tanggal: **(Basrir Hamdani, Ph.D)**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

DINAMIKA POLITIK DPR RI DALAM PERSPEKTIF
ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Disusun oleh:

Azizah Amanuroh

NIM : 21.10.1.111.004

Laporan PPM

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Nilai PPM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

1. Laporan PPM ini murni karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Laporan PPM ini hasil dari jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di STAI Sadra.

Jakarta, 29 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

Azizah Amanuroh

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG LAPORAN PPM ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
KATA PENGANTAR ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan PPM 4
C. Kegunaan PPM 5
D. Tempat Pelaksanaan PPM 6
E. Jadwal Waktu PPM 6
BAB II 9
DESKRIPSI 9
A. DESKRIPSI UMUM 9
1. Sejarah DPR RI 9
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR 11
3. Keanggotaan DPR RI 13
B. DESKRIPSI KHUSUS 14
1. Profil Singkat F-PAN 14
2. Visi dan Misi 17
3. Struktur F-PAN 17
BAB III 22

PELAKSANAAN 22
A. Laporan Kegiatan 22
B. Bidang Kerja 26
C. Pelaksanaan Kegiatan 27
D. Analisis Pelaksanaan PPM 43
1. Kendala yang Dihadapi 43
2. Cara Menghadapi Kendala 44
BAB IV 49
KESIMPULAN 49
A. Kesimpulan 49
B. Saran 50
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN-LAMPIRAN 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Prosesi Sidang Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V 27
Gambar 3. 2 Foto Bersama Pemateri Diskusi Publik 30
Gambar 3. 3 Pemateri Intan Fauzi sedang Memaparkan Materi 31
Gambar 3. 4 Sertifikat Peserta Webinar Sensitif Gender 33
Gambar 3. 5 Foto Bersama Ibu Dessy Ratnasari setelah Audiensi 33
Gambar 3. 6 Proses Rapat DIM di Fraksi PAN 37
Gambar 3. 7 RDPU Komisi VII 38
Gambar 3. 8 Rapat Panja Revisi UU Pilkada di Baleg..... 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Periode Sejarah DPR RI 10
Tabel 2. 2 Sembilan Fraksi DPR RI Periode 2019-2024 15
Tabel 2. 3 Daftar Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI ... 17
Tabel 2. 4 Daftar Anggota F-PAN DPR RI Periode 2019-2024 18
Tabel 3. 1 Absensi Harian……..21
Tabel 3. 2 Kegiatan sebelum Resmi Magang 22
Tabel 3. 3 Kegiatan Harian 23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 . Surat Permohonan PPM 53
Lampiran 2. Surat Surat Persetujuan Lembaga PPM 54
Lampiran 3. Surat Permohonan Kartu Identitas (ID Card) 55
Lampiran 4. Kartu Identitas sebagai Akses Masuk Kantor 55
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai PPM 56
Lampiran 6. Daftar Hadir PPM 57
Lampiran 7. Lembar Kegiatan PPM 58
Lampiran 8. Sertifikat PPM 62
Lampiran 9. Jadwal Waktu 62
Lampiran 10. Foto Kegiatan PPM di DPR RI 63
Lampiran 11. Lembar Bimbingan PPM 64

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāh, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas berkah nikmat, petunjuk serta bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) atau kegiatan magang di Fraksi PAN DPR RI.

Tujuan daripada penulisan laporan magang ini adalah sebagai bukti bahwa penulis telah menyelesaikan kegiatan praktik profesi sebagai syarat kelulusan mata kuliah PPM kampus STAI Sadra yang pada dasarnya merupakan kewajiban penulis sebagai mahasiswa semester VI sebagai syarat melanjutkan pada tingkat semester selanjutnya. Dalam proses penyusunanya, tak jarang penulis menemui kesulitan dan tantangan. Namun, hal-hal yang menjadi kendala dan tantangan tersebut selalu penulis jadikan pelajaran dan motivasi. Berkat bantuan dari berbagai pihak, laporan PPM ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun dengan seoptimal mungkin, dengan upaya maksimal dalam meminimalisir kesalahan serta memperhatikan setiap kekurangan selama proses penyusunan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Karenanya, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hossein Mottaghi selaku direktur Yayasan Hikmat Al-Mustafa dan Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag. selaku ketua STAI Sadra yang telah memfasilitasi program Praktik Profesi Mahasiswa ini.
2. Zaenal Abidin, M.A. selaku dosen pembimbing Praktik Profesi Mahasiswa yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan laporan ini.
3. Istikomah, M.Hum. selaku dosen PAWA yang memberikan arahan kepada penulis untuk menjalankan tugas kuliah dengan baik.
4. Bapak Kumarudin, M.A. selaku pembimbing lapangan yang selalu memberikan ilmu, arahan serta pengalaman baru yang bermanfaat.

5. Ibu Annisa Zakiah, Psb, S.Sos yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mengupayakan sehingga dapat melaksanakan magang di DPR RI.
6. Seluruh staf DPR RI khususnya Fraksi PAN yang memberikan arahan, dukungan, dan kesempatan luar biasa kepada penulis selama menjalani program PPM.
7. Segenap *civitas akademica* STAI Sadra dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.
8. Juga kepada kedua orang tua penulis, saudara, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dorongan dan donasi yang memadai hingga pelaksanaan PPM ini berjalan dengan lancar.

Selain itu, penulis sepenuhnya menyadari bahwa laporan PPM ini belum mencapai kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal struktur kalimat maupun penggunaan tata bahasa yang kurang tepat. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik dari dosen pembimbing serta para pembaca sekalian, agar laporan PPM ini dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Penulis juga berharap semoga laporan PPM ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca sekalian, terutama bagi penulis sendiri.

Jakarta, 29 Agustus 2024

Penulis

Azizah Amanuroh

21.10.1.111.004

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik Profesi Mahasiswa yang selanjutnya akan ditulis PPM, merupakan suatu program kegiatan yang pelaksanaannya meliputi pemahaman teoritis dan implementasi di bidang kajian filsafat maupun ilmu Al-Qur'an dan tafsir dalam profesi atau bidang kerja yang relevan dengan program studi yang ambil oleh mahasiswa. Kegiatan ini merupakan bagian dari salah satu mata kuliah wajib STAI Sadra dengan bobot 3 SKS, dengan syarat telah menempuh studi selama 6 semester atau 86 SKS. PPM menjadi sarana dan suatu upaya untuk mendorong mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dan mengkristisi suatu informasi, berpikir kreatif, *problem solving*, serta kemampuan memformulasikan pendapat secara tepat dan logis sesuai dengan bidang yang dipelajari.

PPM atau yang secara umum disebut sebagai program magang ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya: Pertama, bahwa pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh di kelas perlu dilengkapi dengan adanya praktik lapangan sebagai pengalaman; Kedua, program PPM merupakan upaya untuk mempraktikkan pengetahuan yang didapat di kelas ke dalam praktik profesi di lapangan dan memperkaya wawasan mahasiswa melalui praktik lapangan; Ketiga, sebagai upaya memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja dengan terjun langsung ke dalamnya.

Pelaksanaan PPM tahun 2023/2024 ini mahasiswa ditempatkan di berbagai lembaga seperti lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga penelitian, lembaga penerbitan, lembaga dakwah/ penyuluhan, lembaga ekonomi dan swadaya masyarakat, media cetak dan elektronik, lembaga kenegaraan dan lembaga lainnya yang relevan dengan program studi yang diambil oleh mahasiswa. Dengan adanya program PPM ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman dan kesempatan untuk terlibat langsung dalam dunia profesional. Selain itu, PPM juga

berfungsi sebagai pembuka jaringan dan koneksi. Berupaya berinteraksi dengan para profesional, praktisi, dan ahli selama program PPM berlangsung.

Di antara lembaga kenegaraan terdapat lembaga legislatif yaitu DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki peran sentral dalam sistem pemerintahan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, dan menyetujui anggaran negara. Berdasarkan teori demokrasi dan pemerintahan representatif, DPR RI berfungsi sebagai wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan publik dan menjaga keseimbangan kekuasaan melalui prinsip *checks and balances*.

Dalam program PPM ini, penulis memilih untuk melaksanakannya di lembaga legislatif negara DPR RI tepatnya di Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia (Sekretariat F-PAN DPR RI). Alasan penulis memilih melaksanakan kegiatan PPM di lembaga ini adalah keingintahuan penulis akan pekerjaan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan serta menimba ilmu pengetahuan khususnya di bidang politik dalam prespektif Al-Qur'an dan pengalaman di dunia kerja.

Melaksanakan PPM di lembaga legislatif negara merupakan suatu kesempatan bagi penulis yang mengambil program studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir dalam menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah dalam arena politik dan legislatif, mengamati secara langsung proses pengesahan kebijakan yang nantinya berusaha menganalisis dan mengkritisi kebijakan tersebut dengan landasan nilai-nilai Qur'ani. Juga merupakan kesempatan dalam melatih *soft skill* seperti komunikasi, *public speaking*, dan membangun jaringan untuk pengembangan karir di masa depan.

Memilih pelaksanaan PPM di DPR RI menjadi langkah untuk melatih keterampilan dan kompetensi yang mendukung profil lulusan sebagai jurnalis. Dalam lingkungan legislatif ini, mahasiswa berkesempatan mengamati langsung proses pembuatan kebijakan, rapat

kerja, serta dinamika politik yang penting bagi pengembangan kemampuan analisis, peliputan, dan komunikasi informasi secara efektif.

Selain itu, pelaksanaan PPM ini memperkuat kemampuan membangun jaringan dengan sesama peserta magang, tenaga ahli, dan anggota dewan. Memberikan kesempatan penting bagi jurnalis pemula dalam mengakses sumber berita. Dengan pengalaman ini, mahasiswa tidak hanya belajar menyaring dan menyampaikan informasi secara objektif, tetapi juga memahami dampak kebijakan terhadap masyarakat, yang merupakan esensi dari tugas seorang jurnalis.

Kegiatan PPM yang dilaksanakan kurang lebih dalam hitungan waktu 7 minggu di Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia (F-PAN DPR RI) penulis mendapatkan banyak pengalaman hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah didapatkan selama di bangku kuliah. Pada masa PPM di lembaga legislatif negara ini penulis diperkenankan untuk mengamati prosesi perumusan dan pengesahan kebijakan seperti Sidang Paripurna, Rapat Dengar Pendapar (RDP), Rapat Pantia Kerja (PANJA) serta dilibatkan dalam Rapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-Fraksi DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Selama berlangsungnya kegiatan PPM ini, penulis mendapatkan respon dan bimbingan yang baik dari pembimbing lapangan, para staf dan tenaga ahli di lingkungan kerja F-PAN DPR RI. Hal ini terbukti dalam keseharian penulis mereka sangat terbuka dalam menjawab persoalan-persoalan serta telaten dalam membimbing dan mengarahkan setiap permasalahan. Penulis juga dilibatkan dalam kegiatan fraksi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum dan Rapat Daftar Inventarisasi Masalah, diantaranya penulis terlibat dalam mengamati jalannya rapat atau diberikan kesempatan untuk memberikan saran.

Proses kegiatan PPM yang dilaksanankan dalam waktu 7 (tujuh) minggu tersusun dalam laporan magang ini. Dengan harapan semua pihak yang terlibat dalam program PPM ini mendapatkan pengalaman

dan manfaat serta mampu meningkatkan SDM mahasiswa selaku subjek atau pelaku PPM.

B. Maksud dan Tujuan PPM

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, berikut maksud dilaksanakannya PPM:

1. Suatu upaya untuk memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman baru mengenai kegiatan dan profesionalitas dunia kerja di lembaga legislatif DPR RI khususnya di kantor Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (F-PAN DPR RI).
2. Mempersiapkan diri sebelum terjun di dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Berusaha dalam mengaplikasikan teori-teori dan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah ke dalam dunia kerja terutama dalam memahami dan menganalisis kebijakan yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan, etika dan moralitas yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani.
4. Membangun dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan kerja yang dimiliki terkait profil lulusan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yakni sebagai Jurnalis.
5. Memperkuat pemahaman tentang hukum Islam dan berusaha mengamati bagaimana nilai-nilai Qur'ani diterapkan dalam kebijakan negara.

Adapun tujuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan keilmuan yang telah diperoleh ke dalam dunia kerja.
2. Membiasakan mahasiswa dengan dunia kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni serta memantik mahasiswa dalam mengkritiki suatu problematika dalam dunia kerja.
3. Melatih kedisiplinan, tanggung jawab, pengelolaan waktu dan keluwesan komunikasi dengan patner di dunia kerja.

4. Mendapatkan pengalaman nyata serta mampu menganalisa kebijakan pemerintah dengan terjun langsung ke dalam dunia nyata khususnya di lembaga legislatif kenegaraan.
5. Memenuhi kewajiban PPM yang menjadi mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa STAI Sadra prodi AFI/IAT sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar S.Ag.

C. Kegunaan PPM

Program PPM ini tentunya memiliki keguanaan serta memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti mahasiswa, STAI Sadra serta Instansi terkait. Adapun keguanaan PPM ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa/Praktikan
   a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama.
   b. Menambah wawasan mengenai situasi dan kondisi lembaga.
   c. Melatih kemampuan *problem solving* di dunia kerja.
   d. Melatih dalam mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.
   e. Memahami dan mengetahui proses perumusan hingga pengesahan kebijakan-kebijakan oleh DPR RI.

2. Bagi STAI Sadra
   a. Menjalin kerja sama yang baik antara STAI Sadra dengan lembaga tempat praktikan melaksanakan PPM agar lulusan STAI Sadra dapat dengan mudah memasuki dunia kerja dengan pengalaman kerja sebelumnya.
   b. Sarana menjalankan tanggung jawab sosial karena telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan program PPM kepada mahasiswanya.
   c. Sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan kurikulum dan sistem pembelajaran sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa di masa mendatang

3. Bagi Instansi

a. Menjalin hubungan baik dengan STAI Sadra dalam hubungan saling memberi manfaat satu sama lain di kemudian hari.
b. Terlaksananya tanggung jawab sosial instansi terhadap masyarakat dengan memberikan peluang mengenal dunia kerja.
c. Membangun kemitraan yang solid antara STAI Sadra dengan instansi, sehingga instansi terkait dapat dikenal baik oleh kalangan akademisi.

D. Tempat Pelaksanaan PPM

Penulis melaksanakan kegiatan PPM di DPR RI dan ditempatkan di kantor Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesis (F-PAN DPR RI), yakni sebuah Lembaga Legislatif Negara di bawah naungan pemerintah RI. Berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan PPM:

Nama Instansi : DPR RI (Kantor Sekretariat F-PAN DPR RI)

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan. Jakarta 10270

No Telepon: 021 – 571 5349

Fax: 021 – 571 5423

Website: https://www.dpr.go.id

E. Jadwal Waktu PPM

Waktu Praktik Profesi Mahasiswa dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) minggu. Terhitung dari tanggal Senin, 8 Juli 2024 sampai Kamis, 22 Agustus 2024. Waktu pelaksanaan PPM yang ditentukan oleh F-PAN DPR RI bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan penulis untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu. Adapun rincian absensi akan dilampirkan pada Bab III, sedangkan rincian tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Persiapan PPM dimulai sejak bulan Mei. Setelah mendapatkan pengumuman terkait waktu pelaksanaan PPM oleh Biro Manajemen Tesis, penulis mulai mencari dan menentukan tempat pelaksanaan PPM. Pada tahap ini penulis mencoba untuk menghubungi salah satu Tenaga Ahli yang berada di MPR RI yaitu Ibu Annisa Zakiah, Psb, S.Sos, kemudian menemui beliau pada Jumat, 17 Mei 2024. Penulis diantar oleh ibu Zakiah menuju kantor Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat yang terletak di Gedung Nusantara I tepatnya di lantai 20 untuk menemui Koordinator Sekretariatan Fraksi PAN DPR RI dan menyerahkan surat pengajuan PPM.

Rabu, 26 Juni 2024, penulis menghadiri diskusi publik Fraksi PAN DPR RI "Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan" di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI dan menjadi panitia pada kegiatan tersebut sebagai tahap pengenalan kegiatan magang bersama mahasiswa dari kampus lain yang berstatus magang. Sebelum melaksanakan tahap magang secara resmi, penulis dipersilakan bergabung bersama mahasiswa dari kampus lain yang juga berstatus magang di grup *whatsapp* dan kembali mengunjungi Ruang Sekretariat Fraksi PAN Gedung DPR RI untuk menerima surat balasan penerimaan izin PPM. Kemudian, selanjutnya menyerahkan surat permohonan *identity card* ke PAMDAL DPR RI pada Kamis, 4 Juli 2024.

2. Tahap Pelaksanaan PPM

Pada tanggal 8 Juli 2024, penulis secara resmi melaksanakan kegiatan PPM dan selesai pada tanggal 4 September 2024. Pelaksanaan PPM ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) minggu dengan hari aktif kerja selama 4 (empat) hari, yakni Senin sampai Kamis. Waktu masuk yang ditentukan oleh F-PAN DPR RI juga bersifat fleksibel sehingga memudahkan penulis untuk menyesuaikan diri.

3. Tahap Penulisan Laporan PPM

Penulis mulai menyusun laporan PPM pada akhir bulan Agustus 2024. Penulisan laporan dimulai dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan, kemudian menginput data-data yang diperoleh ke dalam laporan PPM. Sebagai upaya pengumpulan data-data yang dibutuhkan, penulis melakukan browsing di laman internet serta menghubungi pembimbing lapangan untuk meminta arahan.

Sembari melengkapi data-data yang diperlukan, penulis mulai melaksanakan penyusunan laporan PPM pada awal September 2024. Selain itu, sebagai kelengkapan penyusunan laporan PPM ini penulis juga melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh pihak kampus STAI Sadra untuk membantu penulis dalam mengarahkan dan memberi masukan selama pelaksanaan hingga tahap penulisana laporan PPM. Laporan PPM ini dibutuhkan penulis sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa dengan konsentrasi profil lulusan sebagai jurnalis dan konselor.

BAB II
DESKRIPSI

A. DESKRIPSI UMUM

1. Sejarah DPR RI

Sejarah terbentuknya DPR RI dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama adalah pembentukan *Volksraad*, yakni suatu parlemen yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda. *Volksraad* menerapkan demokrasi dengan melibatkan orang pribumi untuk mengambil kebijakan politik.[1] *Volksraad* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menjadi perantara antara rakyat dan penguasa, yakni mengomunisasikan dan menyerap aspirasi rakyat. Dalam hal ini, masyarakat pribumi yang menjadi anggota *Volksraad* menjadi dewan oposisi dan menjadi partai dominan di Fraksi berdasarkan kontrol pemerintah kolonial. Semasa periode berdirinya, *Volksraad* hanya mengesahkan enam undang-undang, dan dari enam undang-undang tersebut hanya tiga yang diterima oleh pemerintah kolonial Belanda. *Volksraad* berhasil menyelesaikan tujuannya yaitu dengan menyusun Undang Undang Dasar untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. [2]

Masuk pada periode kedua di masa perjuangan kemerdekaan, yakni masa setelah masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Pada masa ini Pemerintah Hindia Belanda tidak mampu mengalahkan Jepang dan menyerah pada tangal 8 Maret 1942. Sehingga, dalam hal ini keberadaan *Volsraad* secara otomatis tidak diakui lagi. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Sekutu Amerika dan Uni Soviet sebagai isyarat menyatakan perang terhadap Jepang. Dan pada 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah tanpa

---

[1] Mochamad Irfansyah And Ikhsan Rosyid Mujahidul, "Dpr Gr Dalam Gejolak Demokratisasi Di Indonesia," *Verleden : Jurnal Kesejarahan* Vol. 12, No. Jurnal Kesejarahan, No.1 (June 2018): 53.

[2] Diva Nancy Audissa Simarmata Et Al., "The Role Of The Volksraad In The Dutch East Indies Period," *Holistic Science* 4, No. 1 (May 23, 2024): 137–145, Accessed August 6, 2024.

syarat pada sekutu dalam waktu singkat.[3] Pada 16 Agustus 1945, para tokoh dari golongan muda sepakat untuk membawa golongan tua seperti Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Karawang. Tujuan mereka adalah mendesak supaya golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya yang diwakilkan oleh Soekarno dan Hatta di Pegangsaan Timur. [4]

Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar ketentuan dan kebijakan penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian, berdasarkan ketentuan dalam Aturan Peralihan, pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjadi asal muasal Badan Legislatif di Indonesia, anggota KNIP dilantik di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Dan pada tanggal ini juga lah diresmikan menjadi hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.[5]

Tabel 2. 1 Periode Sejarah DPR RI

No.	Keterangan	Periode
1	Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)	29 Aug 1945 – 15 Feb 1950
2	DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS)	15 Feb 1950 – 16 Aug 1950
3	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)	16 Aug 1950 – 26 Mar 1956
4	DPR hasil Pemilu Pertama	26 Mar 1956 – 22 Jul 1959
5	DPR setelah Dekrit Presiden	22 Jul 1959 – 26 Jun 1960
6	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)	26 Jun 1960 – 15 Nov 1965
7	DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI)	15 Nov 1965 – 19 Nov 1966
8	DPR GR Orde Baru	19 Nov 1966 – 28 Okt 1971
9	DPR hasil Pemilu ke-2	28 Okt 1971 – 1 Okt 1977

[3] Zainul Yafi, Aris Kurniawan, And Ramlan, "Perancangan Buku Sejarah Rengasdengklok Sebagai Pengayaan Mata Pelajaran Siswa Sma," *Fad* 1, No. 01 (September 29, 2022): 13–13, Accessed August 9, 2024.

[4] Dr Achmad Kosasih M.M, *Legislatif Dan Perwakilan Politik* (Indigo Media, 2023).

[5] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Kencana, 2019).

10	DPR hasil Pemilu ke-3	1 Okt 1977 – 1 Okt 1982
11	DPR hasil Pemilu ke-4	1 Okt 1982 – 1 Okt 1987
12	DPR hasil Pemilu ke-5	1 Okt 1987 – 1 Okt 1992
13	DPR hasil Pemilu ke-6	1 Okt 1992 – 1 Okt 1997
14	DPR hasil Pemilu ke-7	1 Okt 1997 – 1 Okt 1999
15	DPR hasil Pemilu ke-8	1 Okt 1999 – 1 Okt 2004
16	DPR hasil Pemilu ke-9	1 Okt 2004 – 1 Okt 2009
17	DPR hasil Pemilu ke-10	1 Okt 2009 – 1 Okt 2014
18	DPR hasil Pemilu ke-11	1 Okt 2014 – 1 Okt 2019

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif di Indonesia, yang pengaturanya diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurut pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Fungsi utama DPR diantaranya:

a. Legislatif: Fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
b. Anggaran: Fungsi untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
c. Pengawasan: Fungsi untuk mengawasi pelaksanaan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.

Adapun tugas DPR diatur dalam Pasal 71 dan 72 UU No. 17/2014 jo. UU No. 2/2018. DPR memiliki tugas sebagai berikut:

a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.
c. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR.

d. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
e. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial
m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
n. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Selanjutnya, berikut ini wewenang DPR RI dalam Pasal 72 UU No. 17/2014:

a. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislatif nasional.
b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.
c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
e. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
f. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
g. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.[6]

3. Keanggotaan DPR RI

Berlandas pada konstitusi Republik Indonesia yakni UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan melaksanakan tiga fungsi: Legislatif, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, yakni setiap Anggota Dewan wajib

[6] Intan Sisma Annisa Fianni, "Mengenal DPR Serta Fungsi, Tugas dan Wewenang Menurut Undang-Undang - Nasional Katadata.co.id," last modified October 21, 2022, accessed August 28, 2024.

mengutamakan kepentingan rakyat yang menjadikan mereka sebagai Wakil Rakyat.

Pada periode 2019-2024 telah terpilih 575 orang Anggota Dewan yang terpilih untuk menjadi Wakil Rakyat yang duduk di kursi DPR RI. Anggota Dewan yang terpilih tersebut bertugas menjadi Wakil Rakyat selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi mereka yang tidak mampu menyelesaikan jabatannya. Anggota Dewan yang berhenti di tengah masa jabatannya akan digantikan oleh Calon Legislator lain (yang mengikuti Pemilu Legislatif) melalui PAW (Pergantian Antar Waktu).

Sebelum melaksanakan tugasnya, para Anggota Dewan terlebih dahulu bersumpah pada hari pelantikan dengan di pandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPR. Sehingga, dengan adanya sumpah tersebut para Anggota Dewan dapat mengemban amanah yang dibebankan kepadanya dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan ketentuan kode etik yang telah ditetapkan.[7]

B. DESKRIPSI KHUSUS

1. Profil Singkat F-PAN

Fraksi merupakan suatu kelompok dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terdiri dari beberapa anggota yang memiliki paham dan tujuan yang sama. Menurut Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 14, Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihana umum.[8] Sedangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (Pasal 11 Nomor 4) tentang Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Selain itu, fraksi juga bertanggung jawab

---

[7] Setjen DPR RI, "Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed August 29, 2024, https://www.dpr.go.id/tentang/keanggotaan.

[8] Kompasiana.com, "Fraksi Dalam Dewan Perwakilan Rakyat," *KOMPASIANA*, last modified August 30, 2017, accessed August 27, 2024.

untuk mengevaluasi kinerja anggota yang kemudian melaorkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.[9]

Tabel 2. 2 Sembilan Fraksi DPR RI Periode 2019-2024

No	Nama Fraksi	Singkatan	Jumlah Anggota	%
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	FPDIP	128	22,26
2	Fraksi Partai Golongan Karya	FPG	85	14,78
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	FGERINDRA	78	13,57
4	Fraksi Partai Nasdem	FNASDEM	59	10,26
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	FPKB	58	10,09
6	Fraksi Partai Demokrat	FPD	54	9,39
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	FPKS	50	8,70
8	Fraksi Partai Amanat Nasional	FPAN	44	7,65
9	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	FPPP	19	3,30
TOTAL :			575	100,0

Sebagai salah satu fraksi yang aktif dalam lembaga legislatif negara, berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki sejarah yang tak terlepas dari sosok Amin Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai politik baru. MARA merupakan salah satu kelompok yang bergerak di era reformasi pemerintahan Soeharto. MARA bersama dengan PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Kelompok Tebet merupakan para pelopor berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN). Amin Rais merasa

[9] Hukum Online, "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009-Pusat Data Hukumonline," *hukumonline.com*, accessed August 27, 2024.

terpanggil setelah menjatuhkan rezim orde baru untuk melanjutkan perjuangan membangun Indonesia dengan mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Amanat Nasional (PAN). Nama partai politik ini awalnya adalah Partai Amanat Bangsa (PAB), kemudian penamaannya diubah menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor. Tokoh pendirinya sejumlah 50 orang, diantara pelopor utamanya adalah Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri M.A, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan Alvin Lie Ling Piao. Kemudian peresmian PAN dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta.

Asas PAN adalah Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam. PAN menjadikan agama sebagai landasan moral, etika berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, PAN merupakan partai terbuka walaupun sebagian orang menganggap sebagai partai orang Muhammadiyah, hal ini karena pada saat itu sosok Amin Rais merupakan Ketua Umum Muhammadiyah.

PAN memiliki logo bergambar matahari berwarna putih yang bersinar cerah sebagai simbolisasi bahwa Partai Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Matahari yang bersinar terang tersebut merefleksikan matahari sebagai sumber cahaya dan sumber kehidupan. Warna putih melambangkan kebenaran, keadilan, dan semangat baru. Pancaran sinar merupakan refleksi dari kemajemukan. Sedangkan bujur sangkar berwarna biru tua merupakan cerminan laut dan langit yang menggambarkan kemerdekaan dan demokrasi.[10]

[10] "Sejarah Singkat Partai Amanat Nasional, PAN: Didirikan Amien Rais Pasca Tumbangnya Orde Baru," *Tribunnews.com*, last modified August 27, 2024, accessed August 27, 2024.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintah yang bersih di dalam negara Indonesia yang demoratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi

a. Mewujudkan kader yang berkualitas.
b. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat
c. Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur.
d. Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat.
e. Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
f. Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.[11]

3. Struktur F-PAN

Tabel 2. 3 Daftar Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI

NO	NAMA	NO. ANGGOTA	JABATAN
1.	Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA	A-480	Ketua
2.	Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si	A-505	Wakil Ketua
3.	H. A. Bakri HM, SE	A-486	Wakil Ketua

[11] "Profil Partai Amanat Nasional (PAN) dan Sejarahnya," *kumparan*, accessed August 27, 2024, https://kumparan.com/berita-terkini/profil-partai-amanat-nasional-pan-dan-sejarahnya-229fODtBe3l.

NO	NAMA	NO. ANGGOTA	JABATAN
4.	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir	A-487	Wakil Ketua
5.	H. Boyman Harun, SH	A-513	Wakil Ketua
6.	Eko Hendro Purnomo, S.Sos	A-493	Sekretaris
7.	Daeng Muhammad, SE., M.Si	A-500	Wakil Sekretaris
8.	Hj. Dewi Coryati, M.Si	A-489	Wakil Sekretaris
9.	Mitra Fakhruddin MB	A-518	Wakil Sekretaris
10.	H. MHD. Asli Chaidir, SH	A-483	Wakil Sekretaris
11.	Pangeran Khairul Saleh	A-514	Wakil Sekretaris
12.	Athari Ghauthi Ardi	A-482	Bendahara
13.	Hj. Intan Fauzi, SH., LLM	A-499	Wakil Bendahara
14.	Abdul Hakim Bafagih	A-506	Wakil Bendahara
15.	Haerudin, S.Ag., MH	A-502	Wakil Bendahara

Tabel 2. 4 Daftar Anggota F-PAN DPR RI Periode 2019-2024

NO	NO. ANG	NAMA ANGGOTA	AKD	JABATAN
1	478	H. NAZARUDDIN DEK GAM ACEH I	Komisi III	Anggota
2	479	MULFACHRI HARAHAP,S.H., M.H. SUMATERA UTARA I	Komisi III	Anggota
3	480	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A. SUMATERA UTARA II	Komisi IX	Anggota
			Badan Musyawarah	Anggota
			Komisi VII	Anggota
			Badan Urusan Rumah Tangga	Wakil Ketua
5	482	ATHARI GAUTHI ARDI SUMATERA BARAT I	Komisi V	Anggota
			Badan Anggaran	Anggota
6	483	H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H. SUMATERA BARAT I	Komisi VIII	Anggota
7	484	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si. SUMATERA BARAT II	Badan Legislasi	Anggota
8	485	Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. RIAU I	Panitia Khusus	Anggota
9	486	H. A. BAKRI HM., S.E. JAMBI	Panitia Khusus	Anggota

			Komisi V	Anggota
10	487	Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR SUMATERA SELATAN I	Komisi XI	Anggota
11	488	HANNA GAYATRI, S.H. SUMATERA SELATAN II	Komisi V	Anggota
12	489	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. BENGKULU	Komisi X	Kapoksi
13	490	KHAIRUL MUHTAR, S.E., M.M. LAMPUNG I	Komisi II	Anggota
14	491	Ir. ALIMIN ABDULLAH LAMPUNG II	Komisi IV	Anggota
15	492	Dr. H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. KEPULAUAN RIAU	Komisi VII	Anggota
16	493	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos DKI JAKARTA I	Komisi VI	Anggota
			Badan Anggaran	Anggota
17	494	DIAN ISTIQOMAH, S.Kep DKI JAKARTA III	Komisi IX	Anggota
18	495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E., M.H JAWA BARAT II	Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	Kapoksi
			Komisi XI	Kapoksi
19	496	H. EDDY SOEPARNO JAWA BARAT III	Komisi VII	Wakil Ketua
20	497	DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi JAWA BARAT IV	Komisi X	Anggota
21	498	PRIMUS YUSTISIO, S.E., M.A.P JAWA BARAT V	Komisi XI	Anggota
22	499	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. JAWA BARAT VI	Badan Legislasi	Anggota
			Komisi VI	Anggota
			Komisi IV	Anggota
23	500	DAENG MUHAMMAD, S.E, M.Si. JAWA BARAT VII	Komisi VI	Anggota
24	501	FARAH PUTERI NAHLIA, B.A, M.Sc. JAWA BARAT IX	Komisi I	Anggota
			Badan Anggaran	Anggota
25	502	HAERUDIN, S.Ag, M.H.	Komisi IV	Anggota

		JAWA BARAT XI		
26	503	Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN D.I. YOGYAKARTA	Komisi II	Anggota
27	504	H. SUNGKONO JAWA TIMUR I	Komisi IX	Anggota
28	505	Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.SI JAWA TIMUR VI	Badan Musyawarah	Anggota
			Komisi I	Kapoksi
29	506	ABDUL HAKIM BAFAGIH JAWA TIMUR VIII	Komisi VI	Kapoksi
30	507	Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. JAWA TIMUR X	Badan Legislasi	Anggota
			Komisi X	Anggota
31	508	SLAMET ARIYADI, S.Psi. JAWA TIMUR XI	Komisi I	Anggota
32	509	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt BANTEN II	Komisi VIII	Anggota
33	510	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si. BANTEN III	Komisi IX	Anggota
34	511	Dr. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M NUSA TENGGARA BARAT I	Komisi IV	Kapoksi
35	512	AHMAD YOHAN, M.Si NUSA TENGGARA TIMUR I	Komisi XI	Anggota
36	513	BOYMAN HARUN, S.H KALIMANTAN BARAT I	Komisi V	Anggota
			Komisi V	Kapoksi
37	514	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M. KALIMANTAN SELATAN I	Komisi III	Wakil Ketua
38	515	Dr. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H. SULAWESI TENGAH	Komisi III	Kapoksi
39	516	Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag. SULAWESI SELATAN I	Komisi VIII	Ketua
40	517	Dr. Hj. ANDI YULIANI PARIS SULAWESI SELATAN II	Komisi VII	Anggota
			Komisi VII	Kapoksi
41	518	MITRA FAKHRUDDIN MB,SP. SULAWESI SELATAN III	Komisi X	Anggota
42	519	FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E. SULAWESI TENGGARA	Komisi VIII	Anggota

43	520	PAULUS UBRUANGGE PAPUA	Komisi II	Anggota
44	521	MESAKH MIRIN PAPUA	Panitia Khusus	Anggota

BAB III
PELAKSANAAN

A. Laporan Kegiatan

1. Kegiatan sebelum Resmi PPM

Sebelum resmi memulai pelaksanaan PPM di DPR RI, penulis telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi tugas yang akan diemban pada saat program PPM berlangsung. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi penelitian mengenai struktur keanggotaan DPR RI, memahami tugas, wewenang serta peran yang ada, dan mempelajari tata cara kerja yang berlaku, juga mengunjungi website resmi DPR RI untuk mempermudah penulis dalam melengkapi data sebagai laporan nantinya. Persiapan ini dilakukan untuk membekali diri dengan pemahaman yang mendalam agar penulis dapat berkontribusi secara efektif selama berlangsungnya PPM. Berikut tahap persiapan yang dilaksanakan penulis:

Tabel 3. 1 Kegiatan sebelum Resmi Magang

Hari/ Tanggal	Kegiatan
Jumat, 17 Mei 2024	Mengunjungi Gedung MPR RI dan Menemui Ibu Annisa Zakiah, Psb, S.Sos di Gedung Nusantara V untuk Meminta Arahan Terkait Prosesi Masuk Lembaga Magang
	Mengunjungi Ruang Sekretariat Fraksi PAN Gedung DPR RI untuk Menyerahkan Surat Pengajuan Magang di Fraksi PAN DPR RI
Kamis, 13 Juni 2024	Mengisi *Google Form* Pengajuan Lembaga Magang
Rabu, 26 Juni 2024	Menghadiri Diskusi Publik Fraksi PAN DPR RI "Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan" di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
	Menjadi Panitia Registrasi dan Konsumsi dalam Kegiatan Diskusi Publik Fraksi PAN DPR RI "Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan" di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
	Berfoto Bersama Pembimbing Magang dengan Mahasiswa yang Berstatus Magang dari Universitas AMIKOM Yogyakarta, Mahasiswa Universitas Pancasila dan Alumni Mahasiswa Magang Fraksi PAN

Jumat, 28 Juni 2024	Menghadiri Kegiatan Pembekalan PPM oleh Manajemen Tesis Bapak Basrir Hamdani, Ph.D
	Mengisi *Google Form* Penerimaan di Lembaga Magang
	Masuk Grup Magang DPR RI
Kamis,4 Juli 2024	Mengunjungi Museum DPR RI
	Mengunjungi Ruang Sekretariat Fraksi PAN Gedung DPR RI untuk Menerima Surat Balasan Penerimaan Izin Magang
	Mengunjungi Pamdal DPR RI Untuk Menyerahkan Surat Permohonan *Identity Card*
	Mendengarkan RDPU Komisi X DPR RI dengan Forum Guru di Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Jumat, 5 Juli 2024	Mendapatkan Dosen Pembimbing PPM
	Melaksanakan Bimbingan Pertama Bersama Dosen Pembimbing, Zaenal Abidin, M. Ud. di Kampus STAI Sadra

2. Laporan Kegiatan Harian

Tabel 3. 2 Kegiatan Harian

Hari, Tanggal	Kegiatan
Senin, 8 Juli 2024	Pengenalan Praktik Magang dengan Pembimbing di Lembaga yakni Bapak Kumarudin, M.A bersama Seluruh Mahasiswa dari Berbagai Kampus yang Berstatus Magang
	Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Kaitan Profesi Magang dengan Program Studi Minat Mahasiswa
Selasa, 9 Juli 2024	Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024
	Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Pansus
	Diskusi bersama Bapak Yusron Terkait Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 10 Juli 2024	Mengunjungi Perpustakaan DPR RI
	Diskusi Publik Webinar dengan Tema "Mewujudkan Fraksi PAN yang Sensitif Gender", yang Diinisiasi dan Kerja Sama TA Fraksi PAN DPR RI dan Mahasiswa magang AMIKOM Yogyakarta.
Kamis, 11 Juli 2024	Mengambil *Identity Card* di Kantor Pamdal DPR RI

	Mendengarkan Audiensi antara Puan PAN Ibu Dessy Ratnasari dari Komisi X dan Delegasi Kampus Institut Pangeran (Indramayu) terkait "Education and Academic Budget for Private University"
Minggu, 14 Juli 2024	Melaksanakan Bimbingan Kedua Bersama Dosen Pembimbing Ustaz Zaenal Abidin, M.Ud di Asrama Putri
Senin, 15 Juli 2024	Membaca Buku Panduan PPM STAI Sadra
	Mengunjungi Laman DPR RI dan Fokus Membaca Tugas Komisi VI, IX, dan X serta Mitra Kerja Komisi-komisi Tersebut
Selasa, 16 Juli 2024	Diskusi Lintas Jurusan bersama Mahasiswa dari Kampus Lain yang Berstatus Magang (UIN Semarang, Universitas Veteran, dan Universitas Pancasila)
	Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Indonesia Emas 2045
Rabu, 17 Juli 2024	Izin Tidak Masuk Kantor dengan Alasan Mengikuti Kegiatan Komunitas
Kamis, 18 Juli 2024	Membaca Buku Panduan PPM STAI Sadra
	Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Hubungan Pancasila dengan Al-Qur'an dan Teori Pemisahan Kekuasaan
Senin, 22 Juli 2024	Membaca Sejarah Berdirinya DPR RI
	Mengunjungi Kandang Rusa dan Kantin Pujasera DPR RI
Selasa, 23 Juli 2024	Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A dan Mahasiswa yang Berstatus Magang dengan Lingkup Pembahasan Kaitan Kasus-kasus Terkini dengan Ayat-ayat Al-Qur'an
	Menyimak Presentasi Akhir Magang Mahasiswa Kampus AMIKOM Yogyakarta terkait Analisis Isu Pemberian Izin Ormas Keagamaan dalam Mengelola Tambang
Rabu, 24 Juli 2024	Mengunjungi Perpustakaan DPR RI
	Menyusun Data Kegiatan Sementara Selama Dua Minggu Magang di DPR RI
Kamis, 25 Juli 2024	Menyusun Data Absensi Sementara Selama Dua Minggu Magang di DPR RI
	Menyimak Presentasi Akhir Magang Mahasiswa Kampus UPN VETERAN terkait Pembahasan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI pada Tanggal 01, 03, dan 09 Juli 2024
Senin, 29 Juli 2024	Menyusun Laporan Sementara

	Mengunjungi Roof Top DPR RI
Selasa, 30 Juli 2024	Menyimak Presentasi Mahasiswa UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNES) dengan Tema Nasib Guru yang Berstatus P1
	Diskusi Bersama Bapak Kumarudin, M.A dengan Mahasiswa yang Berstatus Magang terkait UUP3
	Melaksanakan Bimbingan Ketiga Bersama Dosen Pembimbing Ustaz Zaenal Abidin, M.Ud di Asrama Putri
Rabu, 31 Juli 2024	Menjadi Petugas Operator Presentasi
	Menyimak Presentasi Akhir Magang dari Mahasiswa UIN Semarang dengan Tema Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
	Menyimak Presentasi Akhir Magang dari Mahasiswa UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) dengan Tema Pembahasan "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Aturan Hukum Indonesia"
Kamis, 1 Agustus 2024	Melaksanakan Diskusi Umum
Senin, 5 Agustus 2024	Melaksanakan Diskusi Umum
Selasa, 6 Agustus 2024	Menyaksikan Rapat Pleno Pembahasan RUU yang akan di-*Carry Over* kepada Anggota DPR RI 2024-2029 melalui *Channel Youtube* Resmi DPR RI
	Melaksanakan Diskusi Umum
Rabu, 7 Agustus 2024	Melaksanakan Diskusi Umum
Kamis, 8 Agustus 2024	Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Analisis RUU
	Mengunjungi Museum DPR RI dan Gedung Nusantara
Senin, 12 Agustus 2024	Diskusi singkat bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Analisis Kasus yang akan Diangkat di Presentasi Akhir Mahasiswa Magang
Selasa, 13 Agustus 2024	Melaksanakan Diskusi Umum
Rabu, 14 Agustus 2024	Mengamati Jalannya Rapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-Fraksi DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
Kamis, 15 Agustus 2024	Mengamati Jalannya Rapat Lanjutan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-Fraksi DPR

	RI Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
Senin, 19 Agustus 2024	Diskusi Umum bersama Mahasiswa di F-PAN yang Berstatus Magang
Selasa, 20 Agustus 2024	Mengamati Jalannya Sidang Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025
	RDPU Komisi VIII DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Indonesia: Menerima Masukan Terkait Permasalahan Pekerja dan Pensiunan di RS Haji Jakarta
	RDPU Komisi X DPR RI Terkait Pembiayaan Pendidikan bersama *Indonesia Corruption Watch* (ICW)
Rabu, 21 Agustus 2024	Rapat Panja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terkait putusan MA Terkait Batasan Usia Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Baleg
	Menyimak Rapat Pansus Haji DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penyelenggraan Haji dan Umrah Kemenag RI melalui *Channel YouTube* Resmi DPR RI
Kamis, 22 Agustus 2024	RDP KOMISI XI DPR RI dengan Kepala BPKP, Kepala LKPP, PLT, Kepala BPS, dan SEKJEN BPK RI Pembahasan Laporan Keuangan BPKP, LKPP, BPS, dan BPK dalam APBN TA 2023
Senin, 9 September 2024	Melaksanakan Presentasi Akhir Magang sebagai syarat mendapatkan surat keterangan selesai, sertifikat magang dan penilaian lembaga.

B. Bidang Kerja

1. Pengamat Rapat

Dalam peran ini, penulis bertugas untuk hadir dan mengamati jalannya berbagai rapat yang diselenggarakan oleh DPR RI baik rapat komisi atau fraksi. Tugas utama penulis adalah mencatat poin penting pembahasan dalam rapat yang disaksikan seperti, pendapat yang disampaikan oleh para anggota dewan, serta keputusan-keputusan yang diambil selama rapat. Pengamatan ini mencakup berbagai jenis rapat seperti Rapat Paripurna, Rapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta rapat lain yang diselenggarakan oleh DPR RI. Fokus utama adalah untuk menangkap

dinamika diskusi dan menilai partisipasi serta peran aktif dari anggota Dewan Wakil Rakyat.

2. Analisis Konten Rapat (Jurnalis)

Setelah melakukan pengamatan, penulis bertugas untuk menganalisis konten dari setiap rapat yang dihadiri. Analisis ini meliputi evaluasi terhadap isu-isu yang dibahas, argumen yang disampaikan, dan dampak potensial dari keputusan-keputusan yang diambil. Selain itu, penulis juga menilai sejauh mana kebijakan yang diusulkan berdampak pada masyarakat. Hasil analisis tersebut disusun dalam laporan PPM sebagai pembahasan pelaksanaan kegiatan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Rapat Paripurna



Gambar 3. 1 Prosesi Sidang Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V

Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang diadakan pada 9 Juli 2024 mencakup beberapa agenda penting, termasuk pengambilan keputusan terhadap berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Terdapat beberapa agenda pembicaraan dalam sidang ini. Dalam pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan atas RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam hayati. Ini sangat relevan mengingat tantangan lingkungan yang semakin meningkat seperti deforestasi, perubahan iklim, dan punahnya spesies. Dari perspektif Al-Qur'an, menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban manusia, seperti yang ditegaskan dalam Surat Al-A'raf ayat 31, yang mengingatkan manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk tanggung jawab manusia yang merupakan khalifah di bumi. Oleh karena itu, RUU ini diharapkan mampu mengakomodasi prinsip-prinsip konservasi yang kuat untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia.

Selain itu, agenda lain dalam sidang paripurna ini adalah pembicaraan dan pengambilan keputusan terhadap 26 RUU tentang kabupaten/kota menunjukkan upaya serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Dalam perspektif Islam, konsep musyawarah (*syura*) seperti yang terdapat dalam Surat Asy-Syura ayat 38, sangat relevan dalam konteks ini. Musyawarah merupakan proses partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. RUU tentang kabupaten/kota ini, jika disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dan mempertimbangkan aspirasi mereka, akan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip syura dalam Islam.

Agenda lain yang juga penting adalah pembahasan RUU usul inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, pembaruan undang-undang ini perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan inklusivitas. Pariwisata yang diatur dengan baik dan berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan pendapatan nasional tetapi

juga melindungi warisan budaya dan lingkungan. Dalam perspektif Al-Qur'an, prinsip menjaga keseimbangan dan tidak melakukan kerusakan juga relevan untuk diimplementasikan dalam industri pariwisata. Dengan demikian, undang-undang ini harus memuat regulasi yang memastikan bahwa praktik pariwisata tidak merusak lingkungan dan tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal.

Lebih lanjut, pembahasan mengenai penerimaan hibah Alpahankam dari dan ke luar negeri menunjukkan bahwa Indonesia terus memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan nasionalnya. Dalam Islam, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin, seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 59, yang mengajak umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin yang baik) mereka. Dengan memperkuat pertahanan, Indonesia dapat memastikan stabilitas dan keamanan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Agenda pembicaraan lainnya yaitu terkait pengawasan haji melalui pengusulan hak angket dan pembentukan panitia khusus (Pansus) juga menunjukkan komitmen DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Pentingnya pengawasan ini tidak hanya dalam konteks administrasi dan manajemen, tetapi juga dalam memastikan bahwa pelaksanaan haji dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah. Pengawasan yang efektif akan mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa dana haji dikelola dengan transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang amanah dan kejujuran.

Pembicaraan terakhir yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 serta pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2023 menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Dalam Islam, pengelolaan harta harus dilakukan dengan amanah dan efisien, sebagaimana dicontohkan dalam Surat Al-

Baqarah ayat 282 tentang pentingnya pencatatan transaksi keuangan secara jelas dan adil. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan seksama dan penuh tanggung jawab, serta setiap pengeluaran dipertanggungjawabkan dengan jelas, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Rapat Paripurna ini mencerminkan komitmen DPR RI dalam menangani berbagai isu strategis yang krusial bagi perkembangan bangsa. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pendekatan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan, membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Webinar dan Diskusi Publik



Gambar 3. 2 Foto Bersama Pemateri Diskusi Publik

Diskusi publik webinar dengan tema "Mewujudkan Fraksi PAN yang Sensitif Gender," yang diadakan pada Rabu, 10 Juli 2024, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran akan isu-isu gender di kalangan legislatif Indonesia. Acara ini diinisiasi oleh Tenaga Ahli (TA) Fraksi PAN DPR RI dan bekerja sama dengan mahasiswa magang dari AMIKOM Yogyakarta, menyoroti bahwa isu pelecehan tidak hanya

terbatas pada perempuan tetapi juga mempengaruhi laki-laki, transgender, transpuan, dan kelompok lainnya. Diskusi ini membawa perspektif yang lebih luas tentang gender, menunjukkan bahwa pelecehan seksual dan diskriminasi dapat terjadi pada siapa saja, terlepas dari jenis kelamin atau identitas gender mereka. Ini merupakan pengakuan yang penting, karena seringkali kebijakan dan diskusi tentang gender terfokus hanya pada perempuan, mengabaikan pengalaman dan penderitaan kelompok lain yang juga rentan terhadap pelecehan dan diskriminasi. Dengan demikian, pendekatan inklusif ini membuka ruang untuk dialog yang lebih luas dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan dan kesetaraan gender.



Gambar 3. 3 Pemateri Intan Fauzi sedang Memaparkan Materi

Perspektif yang diangkat dalam webinar ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap semua individu, terlepas dari jenis kelamin atau identitas gender mereka. Misalnya, Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dari satu jiwa yang sama, dan mereka dihargai berdasarkan ketakwaan mereka, bukan pada jenis kelamin, ras, atau status sosial. Tafsir ayat ini menekankan bahwa Allah tidak memandang perbedaan lahiriah tetapi menilai manusia berdasarkan amal baik dan ketakwaan mereka. Ini menunjukkan bahwa diskriminasi berdasarkan gender atau identitas gender tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an mendorong umat manusia untuk memperlakukan satu sama lain dengan keadilan dan hormat, yang mencakup

perlindungan terhadap hak-hak semua individu untuk hidup bebas dari pelecehan dan diskriminasi.

Namun, meskipun pengakuan terhadap berbagai bentuk pelecehan adalah langkah awal yang penting, tantangan utama terletak pada bagaimana mengimplementasikan perubahan yang nyata dan berdampak. Solusi untuk masalah ini harus melibatkan penyusunan kebijakan yang tidak hanya melindungi perempuan tetapi juga laki-laki, transgender, transpuan, dan kelompok lainnya dari pelecehan dan diskriminasi. Fraksi PAN perlu menunjukkan komitmen nyata dengan memperjuangkan regulasi yang mencakup semua aspek kesetaraan gender dan memastikan bahwa perlindungan yang diberikan tidak diskriminatif. Selain itu, perlu ada program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender di kalangan anggota DPR dan masyarakat luas. Ini akan membantu membangun lingkungan yang lebih aman dan inklusif, di mana semua individu dihormati dan diperlakukan setara.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Islam tentang perlindungan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial dapat menjadi panduan yang kuat. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu, serta kewajiban untuk melindungi mereka dari ketidakadilan dan penindasan. Misalnya, dalam Surat An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menegakkan keadilan ketika mereka memutuskan perkara di antara manusia. Hal ini mencakup perlakuan yang adil dan non-diskriminatif terhadap semua individu, terlepas dari identitas gender mereka. Oleh karena itu, Fraksi PAN, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat menggunakan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan ini sebagai landasan dalam setiap keputusan dan kebijakan yang mereka buat.



Gambar 3. 4 Sertifikat Peserta Webinar Sensitif Gender

Kesimpulannya, diskusi publik tentang isu-isu gender harus melibatkan semua aspek masyarakat, tidak hanya berfokus pada perempuan tetapi juga memperhatikan pengalaman laki-laki, transgender, transpuan, dan kelompok lainnya yang mungkin menghadapi bentuk-bentuk pelecehan dan diskriminasi. Dengan mengambil pendekatan yang inklusif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan Islam, Fraksi PAN dapat memimpin dalam menciptakan lingkungan legislatif dan sosial yang lebih adil, di mana hak-hak semua individu diakui dan dilindungi. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjalankan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

3. Audiensi



Gambar 3. 5 Foto Bersama Ibu Dessy Ratnasari setelah Audiensi

Audiensi yang diadakan pada Kamis, 11 Juli 2024, antara Puan PAN Ibu Dessy Ratnasari dari Komisi X DPR RI dan delegasi dari Kampus Institut Pangeran Dharma Kusuma, Indramayu, merupakan langkah penting dalam menyoroti isu pendidikan dan alokasi anggaran akademik untuk universitas swasta di Indonesia. Diskusi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh universitas swasta dalam memperoleh pendanaan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Universitas swasta sering kali menghadapi keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuan mereka untuk menyediakan fasilitas yang memadai, meningkatkan kualitas pengajaran, serta melakukan penelitian yang inovatif. Hal ini menjadi semakin penting karena pendidikan tinggi memainkan peran vital dalam membentuk generasi muda yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang adil dan memadai untuk universitas swasta menjadi krusial, terutama dalam memastikan bahwa mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif Al-Qur'an, pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan dihargai. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam membangun peradaban manusia. Dalam Surat Al-Mujadila ayat 11, Allah berfirman bahwa orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Tafsir dari ayat ini menunjukkan betapa besar penghargaan Allah terhadap ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berilmu. Pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap kemajuan dan kebaikan bersama. Oleh karena itu, dalam konteks audiensi ini, perhatian terhadap pendidikan di universitas swasta bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi juga soal tanggung jawab moral dan etika untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan belajar yang berkualitas. Pemerataan akses pendidikan, baik di universitas negeri maupun swasta, adalah upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

Kritik yang bisa diajukan dari audiensi ini adalah perlu adanya komitmen nyata dari pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar diterapkan secara merata. Sering kali, universitas swasta diabaikan dalam alokasi anggaran karena dianggap memiliki kemampuan finansial yang cukup melalui sumber daya mandiri. Namun, kenyataannya banyak universitas swasta yang masih bergantung pada bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Selain itu, perlu ada mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan bukan untuk kepentingan lain yang tidak relevan. Langkah-langkah konkret seperti ini penting untuk memastikan bahwa audiensi seperti yang diadakan dengan Ibu Dessy Ratnasari ini menghasilkan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam distribusi sumber daya. Misalnya, dalam Surat An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menegakkan keadilan. Tafsir ayat ini mengajarkan bahwa keadilan dalam membagikan sumber daya, seperti anggaran pendidikan, adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap pemimpin. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan ini, pemerintah dan DPR dapat memastikan bahwa semua institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Ini akan membantu membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan merata, yang pada akhirnya akan menghasilkan generasi muda yang lebih berpengetahuan dan berakhlak, siap untuk menghadapi tantangan masa depan.

Kesimpulannya, audiensi antara Puan PAN Ibu Dessy Ratnasari dan delegasi dari Kampus Institut Pangeran Dharma Kusuma, Indramayu, menyoroti pentingnya perhatian terhadap alokasi anggaran pendidikan untuk universitas swasta. Dengan mempertimbangkan perspektif Al-

Qur'an tentang pentingnya pendidikan dan keadilan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dari diskusi ini akan mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan yang lebih merata dan inklusif di Indonesia. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat sektor pendidikan tetapi juga akan membawa kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemajuan yang diajarkan dalam Islam.

4. Rapat DIM

Pada Rabu, 14 Agustus 2024, penulis mengikuti jalannya Rapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, tepatnya di Fraksi PAN. Rapat ini merupakan forum penting untuk mendiskusikan dan mengevaluasi aspek-aspek yang memerlukan penyesuaian dalam regulasi paten yang ada. Proses legislasi ini melibatkan pembahasan mendalam mengenai berbagai isu yang terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, mulai dari mekanisme pendaftaran paten, durasi perlindungan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran paten. Fraksi PAN berfokus pada memastikan bahwa revisi undang-undang ini tidak hanya memenuhi kebutuhan industri dan penemu, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam hal aksesibilitas teknologi dan inovasi.

Dalam perspektif Al-Qur'an, pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual, seperti paten, dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak milik. Al-Qur'an menekankan pentingnya menghargai hak-hak milik individu dan mencegah pengambilan harta secara batil. Surat An-Nisa ayat 29 mengajarkan bahwa kita tidak boleh memakan harta orang lain tanpa hak, dan ini termasuk hak kekayaan intelektual. Tafsir dari ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk hak milik, termasuk hasil inovasi dan penemuan, harus dilindungi secara adil. Dalam konteks undang-undang paten, ini berarti bahwa hak-hak atas penemuan dan karya intelektual harus dihormati dan dilindungi dari

pelanggaran, sehingga penemu mendapatkan penghargaan yang setimpal atas usaha dan kreativitas mereka.



Gambar 3. 6 Proses Rapat DIM di Fraksi PAN

Rapat DIM di Fraksi PAN ini harus mempertimbangkan beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa perubahan dalam undang-undang paten dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam Al-Qur'an. Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah keseimbangan antara perlindungan hak paten dan kepentingan umum. Terlalu banyak perlindungan bisa menghambat inovasi dan aksesibilitas teknologi oleh masyarakat, sementara perlindungan yang kurang dapat merugikan penemu dan pengembang yang membutuhkan insentif untuk berinovasi. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan undang-undang yang memberikan perlindungan yang memadai tanpa mengabaikan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari inovasi tersebut.

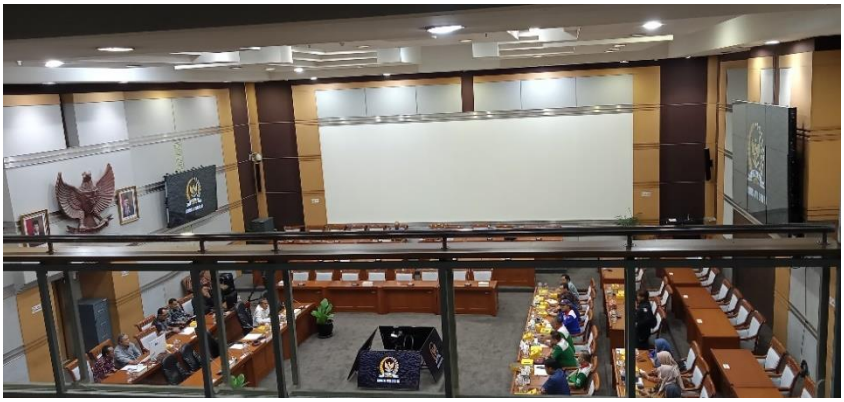
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa proses legislasi ini transparan dan akuntabel. Fraksi PAN harus mendorong adanya mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa perubahan undang-undang ini diimplementasikan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an juga menuntut agar semua keputusan yang diambil harus adil dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Dalam kerangka ini, peran Fraksi PAN sangat krusial dalam memastikan bahwa revisi undang-undang paten tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip hukum dan regulasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai

keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang efektif dalam melindungi hak kekayaan intelektual, mendukung inovasi, dan memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Rapat DIM ini bukan hanya sekadar forum legislasi, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak yang lebih luas dalam sistem hukum Indonesia.

5. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Pada Selasa, 20 Agustus 2024, penulis menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Indonesia, yang membahas permasalahan yang dihadapi pekerja dan pensiunan di RS Haji Jakarta. RDPU ini menjadi forum penting untuk mendengarkan keluhan dari pensiunan dan keluarga pensiunan RS Haji yang belum menerima pembayaran uang pensiun yang dijanjikan pada bulan Agustus. Hingga akhir bulan Agustus, tidak ada kebijakan terbaru yang diumumkan, dan janji pembayaran pensiun belum terpenuhi. Pimpinan sidang Komisi VIII menyatakan bahwa pembayaran pensiun diharapkan dapat diberikan pada bulan September, namun situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya penundaan lebih lanjut atau bahkan pengalihan dana pensiun ke pos lain.



Gambar 3. 7 RDPU Komisi VII

Dalam perspektif Al-Qur'an, permasalahan ini dapat dianalisis melalui prinsip keadilan dan hak-hak individu. Al-Qur'an dengan tegas mengajarkan tentang pentingnya memenuhi janji dan hak-hak yang telah disepakati, sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Isra ayat 34: "Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya." Tafsir ayat ini menekankan bahwa setiap bentuk janji harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab, dan ketidakpastian atau penundaan dalam pembayaran pensiun mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip ini. Dana pensiun, sebagai hak yang telah dijanjikan kepada pensiunan, harus dibayar tepat waktu, dan segala bentuk penundaan atau pengalihan dana dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak milik yang dijamin oleh Islam.

Lebih jauh, dalam konteks ini, terdapat asumsi yang kemungkinan adanya penggelapan dana pensiun yang seharusnya diberikan kepada yang berhak adalah hal yang sangat serius. Islam menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam mengelola amanah, seperti yang diungkapkan dalam Surat Al-Anfal ayat 27: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pensiun harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dan setiap penyimpangan atau penggelapan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Dalam rapat RDPU ini, penting bagi Komisi VIII untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun. Proses yang terbuka dan jujur dalam menangani masalah ini akan membantu mengembalikan kepercayaan pensiunan dan masyarakat pada sistem pengelolaan keuangan negara. Komisi VIII harus mendorong penyelidikan mendalam jika terdapat indikasi penggelapan atau penyalahgunaan dana, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang diatur dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian, RDPU ini bukan hanya sekadar forum untuk mendengarkan keluhan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan amanah dalam pengelolaan dana pensiun. Penyelesaian masalah ini harus mencerminkan komitmen untuk memenuhi hak-hak pensiunan dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan publik, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kejujuran.

RDPU pembahasan masalah pembayaran pensiun di RS Haji Jakarta ini, berkaitan pula dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab yang diatur dalam Al-Qur'an. Pentingnya berlaku adil kepada setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau keadaan. Keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek terutama pada hal pembayaran pensiun, memastikan bahwa pensiunan, yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk kerja keras selama masa aktif mereka, mendapatkan hak mereka sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan dana pensiun yang terhambat atau ditunda, seperti yang terjadi di RS Haji, tidak hanya merugikan individu yang berhak menerima tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan keuangan negara. Menurut Al-Qur'an, setiap tindakan pengabaian hak-hak orang lain atau penyimpangan dari kewajiban merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah.

Dalam konteks pengelolaan dana pensiun, prinsip ini berarti bahwa setiap pihak yang mengelola dana harus memastikan bahwa semua kewajiban dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada penundaan yang tidak perlu. Kegagalan untuk mematuhi janji atau mengalokasikan dana dengan cara yang tidak sesuai dapat dianggap sebagai pengabaian amanah, yang harus dihindari sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, Komisi VIII perlu memastikan adanya transparansi penuh dan akuntabilitas dalam proses pembayaran pensiun, serta melakukan investigasi yang mendalam jika terdapat indikasi penyimpangan atau penggelapan. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pensiunan mendapatkan hak mereka secara adil dan tepat waktu, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an tentang keadilan dan tanggung jawab.

6. Rapat Panja (Panitia Kerja)



Gambar 3. 8 Rapat Panja Revisi UU Pilkada di Baleg

Rabu, 21 Agustus 2024, penulis mengamati Rapat Panja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui laman *YouTube* resmi DPR RI yang dilaksanakan di Baleg DPR RI. Rapat ini membahas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batasan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Rapat ini secara mendadak membahas perubahan mengenai usia minimum calon gubernur yang kini ditetapkan pada 30 tahun, yang dihitung pada saat pelantikan, bukan saat pemilihan. Penjadwalan rapat yang tiba-tiba ini memicu kegelisahan di kalangan masyarakat, yang kemudian memicu demonstrasi massa pada Kamis, 22 Agustus 2024, dengan dorongan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan mendadak ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan proses legislasi yang adil, serta dampaknya terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Dalam perspektif Al-Qur'an, analisis terhadap keputusan dan proses legislasi ini dapat dilihat melalui prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam wahyu Ilahi. Surat An-Nisa ayat 58 menyatakan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil". Ayat ini menekankan pentingnya melaksanakan amanat dengan adil dan transparan. Proses legislasi yang

mendadak dan kurang transparan dalam menetapkan usia calon gubernur bisa dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan ini, karena tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau menyuarakan pendapat mereka sebelum keputusan diambil.

Selain itu, transparansi dan kejelasan dalam semua transaksi dan keputusan, termasuk proses legislasi sangat penting untuk dilaksanakan. Rapat dadakan yang membahas perubahan signifikan dalam UU KPU tanpa pemberitahuan sebelumnya dapat dianggap melanggar prinsip ini, karena keputusan penting diambil tanpa prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa semua pihak terkait mengetahui dan memahami perubahan yang diusulkan.

Rapat Panja ini juga menyoroti kebutuhan untuk mempertimbangkan suara dan kepentingan publik. Dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu." Tafsir dari ayat ini menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam perlakuan terhadap semua orang, termasuk dalam proses legislasi. Ketidakpuasan masyarakat yang mengarah pada demonstrasi massa mencerminkan bahwa keputusan yang diambil tidak dianggap adil atau transparan oleh sebagian besar warga, yang menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Dengan demikian, rapat Panja ini menyoroti tantangan dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses legislasi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa semua perubahan undang-undang dilakukan dengan prosedur yang jelas, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem legislatif, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan hak-hak seluruh masyarakat.

D. Analisis Pelaksanaan PPM

1. Kendala yang Dihadapi

Kendala merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam lini kehidupan ini, baik dalam berkegiatan atau pekerjaan. Begitu pula dalam pelaksanaann Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) ini. Berikut merupakan rincian kendala yang dialami oleh penulis dalam pelaksanaan PPM di F-PAN DPR RI:

a. Jarak Lokasi PPM

Dalam seminggu penulis hadir ke kantor mengambil waktu empat hari kerja. Selama menjalani program PPM, salah satu kendala yang penulis hadapi adalah jarak kantor yang cukup jauh dari asrama. Kondisi ini mengakibatkan penulis harus mengalokasikan waktu dan tenaga ekstra setiap hari untuk perjalanan ke kantor, yang memakan waktu cukup lama. Selain itu, biaya transportasi menggunakan kendaraan umum juga menjadi tantangan tersendiri, karena tarif yang relatif mahal jika diakumulasikan selama masa magang. Hal ini tidak hanya membebani secara finansial, tetapi juga mengurangi waktu produktif yang bisa digunakan untuk kegiatan lain seperti persiapan diri sebelum rapat.

b. Hambatan Presentasi Akhir PPM

F-PAN DPR RI menerapkan wajib presentasi akhir bagi mahasiswa yang melaksanakan magang. Presentasi yang dimaksudkan adalah meminta mahasiswa yang berstatus magang untuk mengangkat satu isu politik dari rapat yang pernah dihadiri untuk dianalisa dan diangkat menjadi materi presentasi sebagai syarat mendapatkan berkas-berkas seperti penilaian lembaga kepada mahasiswa, surat keterangan selesai magang, dan sertifikat sebagai penghargaan F-PAN DPR RI kepada mahasiswa tersebut. Namun, dalam hal ini penulis mendapatkan kendala dalam menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan presentasi akhir magang sehingga menyebabkan

penulis tidak bisa melaksanakan sidang PPM pada awal waktu yang telah ditentukan oleh Biro Manajemen Tesis. Juga, menyebabkan penulis tidak dapat melengkapi laporan PPM tepat waktu.

c. Kendala Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting sebelum terjun dalam dunia kerja. Dalam hal ini, penulis menghadapi kendala berupa kurangnya pengetahuan dalam bidang politik karena pada dasarnya penulis bukanlah mahasiswa dari jurusan ilmu politik, ilmu pemerintahan, ataupun ilmu hukum yang memiliki fokus studi pada ranah politik, sehingga penulis masih merasa asing pada pengetahuan yang terkait politik.

2. Cara Menghadapi Kendala

a. Jarak Lokasi PPM

Untuk menghadapi kendala jarak yang cukup jauh dan biaya transportasi yang relatif mahal selama PPM, penulis menerapkan strategi dengan menggunakan transportasi umum dengan tarif lebih terjangkau seperti Jaklingko, Transjakarta, KRL, dan MRT, sehingga dapat menghemat biaya perjalanan. Kedua, mencoba menyesuaikan jadwal keberangkatan lebih awal untuk menghindari kemacetan dan lamanya menunggu kedatangan transportasi yang digunakan.

b. Hambatan Presentasi Akhir PPM

Untuk mengatasi masalah ini, penulis mengambil langkah proaktif dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan pihak F-PAN DPR RI, terutama dengan pembimbing lapangan dan bagian administrasi. Penulis menjelaskan situasi yang dihadapi dan mengajukan permohonan untuk penjadwalan ulang presentasi akhir sesuai dengan ketersediaan waktu yang lebih fleksibel. Selain itu, penulis juga berkoordinasi dengan Biro Manajemen Tesis untuk memberikan informasi terbaru mengenai

situasi dan meminta perpanjangan waktu jika diperlukan. Dengan melakukan komunikasi yang terbuka dan kooperatif, penulis berhasil menemukan solusi yang memadai sehingga dapat melaksanakan presentasi akhir dan melengkapi semua persyaratan magang dengan baik.

c. Kendala Pengetahuan

Untuk mengatasi kendala kurangnya pengetahuan dalam bidang politik, penulis dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk mempersiapkan diri sebelum dan selama menjalani program magang. Pertama, penulis melakukan pembelajaran mandiri dengan membaca literatur dasar tentang politik, pemerintahan, dan hukum yang relevan melalui artikel jurnal serta berita terkini mengenai isu-isu politik sebagai upaya memantik pemahaman dasar yang diperlukan dengan memanfaatkan situs web yang membahas topik-topik terkait politik. Kedua, berinteraksi aktif dengan rekan-rekan magang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang politik atau hukum juga dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga. Ketiga, penulis dapat meminta bimbingan dari pembimbing lapangan di F-PAN DPR RI untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai isu-isu yang dibahas dalam rapat dan bagaimana dampaknya pada kebijakan publik. Dengan cara ini, penulis tidak hanya dapat memperluas wawasan tentang dunia politik, tetapi juga lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab selama magang.

E. Analisis Hasil Pelaksanaan PPM

Selama masa PPM, penulis sebagai pengamat rapat-rapat perumusan hingga pengesahan kebijakan (UU) di DPR RI, banyak pengalaman dan pengeteahuan yang didapatkan khususnya bidang proses legislasi di Indonesia. Berikut adalah analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan selama PPM di DPR RI:

1. Pemahaman terkait Proses Legislasi

Selama berlangsungnya kegiatan PPM, penulis sebagai peserta pengamat pelaksanaan prosesi legislasi mendapatkan pemahaman terntang berbagai tahap yang dilalui dalam proses pembentukan undang-undang, mulai tahap perumusan, pembahasan, revisi, hingga pengesahan. Pengamatan terhadap dinamika rapat-rapat kerja antara anggota DPR, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, sehingga membuka wawasan penulis mengenai kompleksitas negoisasi yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang didapatkan penulis adalah dapat memahami bahwa setiap kebijakan yang diusulkan akan selalu melalui diskusi intensif dan pertimbangan dari berbagai pihak. Adapun kekurangannya adalah terdapat keterbatasan waktu bagi penulis untuk menyaksikan keseluruhan tehapan secara komprehensif karena lamanya siklus prosesi pembuatan hingga pengesahan suatu undang-undang.

2. Keterampilan Menganalisis Kebijakan

   Pengamatan rapat-rapat yang dihadiri selama kegiatan PPM secara tidak langsung memberikan penulis kesempatan untuk membangun kemampuan dalam menganilisis kebijakan yang dibahas selama berlangsungnya rapat. Juga kesempatan mempelajari bagaimana berbagai isu publik dan kepentingan masyarakat diintegrasikan dalam rancangan undang-undang. Kelebihan yang diperoleh dalam hal ini adalah membangun kemampuan dengan memantik untuk mengkritisi dan kemapuan *problem solving* dalam menganalisa kebijakan tersebut. Namun dalam hal ini, terdapat kekurangan yang memerlukan perhatian yakni kebutuhan setiap peserta magang untuk dapat dibimbing lebih lanjut untuk menganalisis berbagai dokumen kebijakan serta diberikan akses untuk dapat mewancarai anggota dewan atau para ahli di bidang tersebut, sehingga dalam proses mengaanalisa dapat memperoleh hasil maksimal.

3. Komunikasi Antar Lembaga

   Selama pelaksanaan PPM, penulis menyaksikan interaksi antara berbagai lembaga negara, seperti DPR, pemerintah, dan badan-badan

lain yang terkait. Dinamika yang terjadi dalam bentuk kerja sama dan memberikan gambaran nyata tentang gambaran nyata yang memperlihatkan peran masing-masing dalam proses legislasi. Kelebihan yang diperoleh adalah mendapatkan wawasan terkait bagaimana pentingnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga untuk memastikan kebijakan yang diperoleh dapat diimplementasikan dengan efektif. Sedangkan kekuranganya yaitu terbatasnya akses langsung terhadap diskusi informal antar lembaga yang bersifat tertutup, sehingga penulis tidak dapat menghadiri dan mengamati bagaimana prosesi komunikasi antar lembaga tersebut berlangsung.

4. Pemahaman Mengenai Tantangan Hukum dan Politik

   Tantangan hukum dan politik sering kali muncul dalam setiap tahapan legislasi. Penulis menyadari bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya sekadar pertimbangan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kelebihan dari hal ini adalah memperkaya wawasan penulis terkait realitas politik di balik proses legislasi. Adapun kekurangannya yakni wawasan tentang politik praktis yang memengaruhi keputusan legislatif masih memerlukan pendalaman sehingga memerlukan bimbingan serta arahan ahli dalam bidang tersebut.

5. Relasi dan Pengembangan Jaringan

   Selain pemahaman teknis, pengalaman berinteraksi dengan orang-orang baru menjadi salah satu aspek yang sangat berharga selama pelaksanaan PPM. Penulis berkesempatan membangun hubungan dengan teman-teman magang dari kampus lain, yang berasal dari program studi dan jurusan berbeda, tenaga ahli, hingga anggota dewan legislatif DPR RI. Kelebihan yang didapatkan yakni dengan adanya interaksi ini dapat memperluas jaringan dan menjadi sumber pembelajaran baru, baik dari sisi substansi kebijakan maupun cara berpikir kritis. Komunikasi yang terjalin memungkinkan diskusi tentang kebijakan secara mendalam, sehingga mampu memantik pemikiran kritis terhadap suatu kebijakan serta melatih kemampuan *problem-solving* serta dengan adanya interaksi ini dapat

memperkuat jaringan profesional dan kemampuan komunikasi lintas disiplin ilmu. Adapun kekurangannya adalah bahwa pengalaman yang sangat berharga ini terbatas oleh waktu, sehingga kesempatan untuk berkomunikasi secara intensif untuk beertukar pikiran menjadi hambatan dalam memperdalam relasi.

Secara keseluruhan, selama masa PPM ini berlangsung memberikan banyak manfaat baik dalam hal pemahaman teknis proses legislasi, pengembangan keterampilan analisis kebijakan, maupun perluasan jaringan profesional. Kendati demikian, terdapat tantangan seperti keterbatasan akses terhadap dinamika politik yang lebih dalam dan keterbatasan waktu untuk memperdalam relasi dengan berbagai pihak. Evaluasi ke depannya adalah diharapkan dapat meningkatkan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan serta para ahli terkait untuk memperkaya wawasan serta memperdalam kajian terkait legislasi dalam konteks Islam dan hukum positif Indonesia.

BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Laporan Program Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) ini memberikan gambaran mengenai pengalaman penulis selama menjalani magang di Fraksi PAN DPR RI. Melalui berbagai kegiatan seperti pengamatan rapat, analisis konten rapat, dan keterlibatan dalam diskusi politik, penulis memperoleh wawasan yang berharga mengenai dinamika politik di lembaga legislatif. Pengalaman ini tidak hanya memperluas pengetahuan penulis tentang proses pembuatan kebijakan di DPR RI dan peran Fraksi PAN, tetapi juga meningkatkan keterampilan dalam analisis dan komunikasi politik.

Selama masa magang, penulis menghadapi beberapa kendala, seperti jarak kantor yang jauh, biaya transportasi yang tinggi, dan kurangnya pengetahuan awal tentang politik. Namun, melalui solusi yang diterapkan, termasuk pengelolaan waktu yang efisien, komunikasi proaktif dengan pihak terkait, dan pembelajaran mandiri, penulis berhasil mengatasi tantangan tersebut. Langkah-langkah ini memastikan bahwa penulis dapat menyelesaikan tugas magang dengan baik dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Fraksi PAN DPR RI dan Biro Manajemen Tesis.

Secara keseluruhan, program PPM ini telah memberikan pengalaman yang berharga dan memperkaya pemahaman penulis tentang politik dan kebijakan publik. Integrasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam analisis politik juga menambah dimensi etis dalam kajian kebijakan. Pengalaman ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan keterampilan profesional penulis, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pengambilan keputusan di DPR RI.

B. Saran

Merujuk pada pengalaman penulis selama menjalankan Praktik Profesi Mahasiwa (PPM), terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sehingga dapat membantu pelaksanaan PPM di masa mendatang. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan:

1. Bagi Mahasiswa

   a. Mahasiswa yang akan menjalani program magang disarankan untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai pelaksanaan PPM, termasuk meningkatkan pengetahuan dasar terkait bidang yang akan digeluti.
   b. Mencari dan menentukan lembaga PPM dari jauh hari sebelum pelaksanaan PPM diresmikan dan mempersiapkan kelengkapan data yang diperlukan sebelum mengajukan pelaksanaan PPM di lembaga yang telah ditentukan.
   c. Aktif berpartisipasi dan berkomunikasi dengan pembimbing lapangan maupun pembimbing yang telah ditentukan oleh pihak kampus serta rekan kerja, sehingga dapat memaksimalkan pengalaman belajar dan jaringan profesional mereka.
   d. Mengelola waktu dan tanggung jawab dengan baik juga merupakan kunci untuk sukses dalam pelaksanaan PPM ini, serta menjaga sikap proaktif dalam mencari peluang belajar tambahan di luar tugas utama.

2. Bagi Kampus

   a. Memberikan bimbingan yang lebih intensif dan persiapan yang matang bagi mahasiswa sebelum mereka terjun ke dunia kerja melalui program PPM.
   b. Menyediakan seminar, workshop, atau kursus singkat yang relevan dengan bidang yang akan digeluti oleh mahasiswa yang hendak melaksanakan PPM, sehingga dapat membantu mahasiswa lebih siap
   c. Kampus perlu menjalin mitra yang lebih erat dengan berbagai lembaga untuk memastikan ketersediaan tempat pelaksanaan

PPM yang sesuai dengan jurusan dan minat mahasiswa sehingga lembaga yang dituju lebih bervariatif.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program magang.
e. Mempertimbangkan alternatif seperti menerima laporan PPM dalam bentuk soft file saja atau menyediakan dana untuk mencetak laporan, mengingat kampus STAI Sadra berbasis beasiswa. Selain itu, kampus dapat mensponsori atau memfasilitasi turunnya dana untuk mendukung kebutuhan administrasi mahasiswa selama program PPM berlangsung. Mengingat beban administrasi dan biaya yang ditanggung mahasiswa, kampus juga sebaiknya meniadakan sidang PPM, dengan alasan untuk meringankan beban finansial dan administratif mahasiswa, serta memfokuskan evaluasi pada kualitas laporan yang telah disiapkan oleh mahasiswa.

3. Bagi Lembaga PPM
   a. Memberikan orientasi yang mendetail kepada mahasiswa magang, agar mereka lebih memahami visi, misi, serta prosedur kerja di lembaga tersebut.
   b. Lembaga magang perlu menyediakan mentor atau pembimbing yang siap mengarahkan dan memberikan dukungan kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang secara maksimal.
   c. Menyediakan fleksibilitas dalam jadwal magang dan mendukung kebutuhan akademik mahasiswa, seperti persyaratan laporan dan presentasi akhir, juga penting untuk memastikan pengalaman magang yang positif dan bermanfaat bagi semua pihak.
   d. Lembaga dapat menyelenggarakan sesi networking atau diskusi panel dengan para profesional industri sehingga dapat memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli dan memperluas jaringan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Irfansyah, Mochamad, and Ikhsan Rosyid Mujahidul. “DPR GR Dalam Gejolak Demokratisasi Di Indonesia.” VERLEDEN : Jurnal Kesejarahan Vol. 12, no. Jurnal Kesejarahan. No.1 (June 2018).

Jurdi, Fajlurrahman. Hukum Tata Negara Indonesia. Kencana, 2019.

Kompasiana.com. “Fraksi Dalam Dewan Perwakilan Rakyat.” KOMPASIANA. Last modified August 30, 2017.

M.M, Dr Achmad Kosasih. Legislasi dan Perwakilan Politik. Indigo Media, 2023.

Online, Hukum. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 - Pusat Data Hukumonline.” hukumonline.com.

RI, Setjen DPR. “Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat.

Simarmata, Diva Nancy Audissa, Duana Angel Simanjuntak, Rendi Rianto Simarmata, and Rosmaida Sinaga. “The Role of the Volksraad in the Dutch East Indies Period.” Holistic Science 4, no. 1 (May 23, 2024): 137–145.

Sisma, Intan, Annisa Fianni. “Mengenal DPR Serta Fungsi, Tugas dan Wewenang Menurut Undang-Undang - Nasional Katadata.co.id.” Last modified October 21, 2022.

Yafi, Zainul, Aris Kurniawan, and Ramlan. “PERANCANGAN BUKU SEJARAH RENGASDENGKLOK SEBAGAI PENGAYAAN MATA PELAJARAN SISWA SMA.” FAD 1, no. 01 (September 29, 2022): 13–13.

“Profil Partai Amanat Nasional (PAN) dan Sejarahnya.” kumparan. Accessed August 27, 2024.

“Sejarah Singkat Partai Amanat Nasional, PAN: Didirikan Amien Rais Pasca Tumbangnya Orde Baru.” Tribunnews.com. Last modified August 27, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 . Surat Permohonan PPM



STAI SADRA
Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra

Program Studi
1. Aqidah dan Filsafat Islam (S1)
2. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (S1)
3. Magister Aqidah dan Filsafat Islam (S2)

Nomor : 160/EDU-EXT/STAI-SADRA/PPM/V/2024
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Izin Praktik Profesi Mahasiswa (Magang)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Fraksi PAN-DPR RI

di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji milik Allah SWT. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabat setianya. Demikian pula semoga kesuksesan senantiasa menyertai Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Bersama ini Kami dengan hormat memohon izin bagi mahasiswa program sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, dengan identitas sebagai berikut:

1	Nama	: Sulis Setia Ningsih
	NIM	: 21.10.1.211.021
	Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
	Semester	: VI
2	Nama	: Azizah Amanuroh
	NIM	: 21.10.1.111.004
	Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
	Semester	: VI

Untuk dapat melakukan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) atau magang di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penguatan profil mahasiswa STAI Sadra.

Demikian surat permohonan ini Kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan Kami mengucapkan terima kasih atas izin dan kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 16 Mei 2024

Dr. Khalid Al Walid, M.Ag
Ketua STAI Sadra

Kampus STAI Sadra: Jl. Lebak Bulus II No. 2, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430.
Telepon : +62-21-2946-6460 Fax : +62-21-2923-5488
Website : www.sadra.ac.id Email : stfi.sadra@yahoo.com

Lampiran 2. Surat Surat Persetujuan Lembaga PPM



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
JL. Jend. Gatot Subroto,Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811

PAN

Nomor : 02.1679/PKPF/F-PAN/DPR RI/VII/2024 04 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Magang di Fraksi PAN DPR RI

Kepada Yth.
Universitas STAI Sadra
Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat dari Universitas STAI Sadra nomor : 160/EDU-EXT/STAI-SADRA/PPM/V/2024 perihal permohonan Magang. Pimpinan Fraksi PAN DPR RI dapat menerima permohonan magang mahasiswa Universitas STAI Sadra Fakulas Ilmu Ushuluddin atas nama :

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Sulis Setia Ningsih	21101211021	Aqidah dan Filsafat Isla,
2.	Azizah Amanuroh	21101111004	Ilmu AL-Quran dan Tafsir

Dimulai magang di Fraksi PAN DPR RI dari bulan 08 Juli 2024 sampai 16 Agustus 2024.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

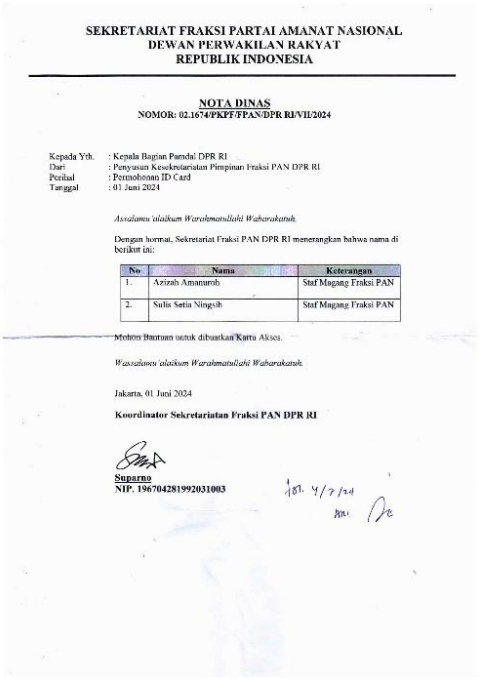
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 04 Juli 2024

a,n Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI
Kepala Sekretariat Fraksi PAN DPR RI

Suparno
Nip 196704281992031003

Lampiran 3. Surat Permohonan Kartu Identitas (ID Card)



SEKRETARIAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
NOMOR: 02.1674/PKPF/FPAN/DPR RI/VII/2024

Kepada Yth. : Kepala Bagian Pamdal DPR RI
Dari : Penyusun Kesekretariatan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI
Perihal : Permohonan ID Card
Tanggal : 01 Juni 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, Sekretariat Fraksi PAN DPR RI menerangkan bahwa nama di berikut ini:

No.	Nama	Keterangan
1.	Azizah Amanuroh	Staf Magang Fraksi PAN
2.	Sulis Setia Ningsih	Staf Magang Fraksi PAN

Mohon bantuan untuk dibuatkan Kartu Akses.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 01 Juni 2024

Koordinator Sekretariatan Fraksi PAN DPR RI

Suparno
NIP. 196704281992031003

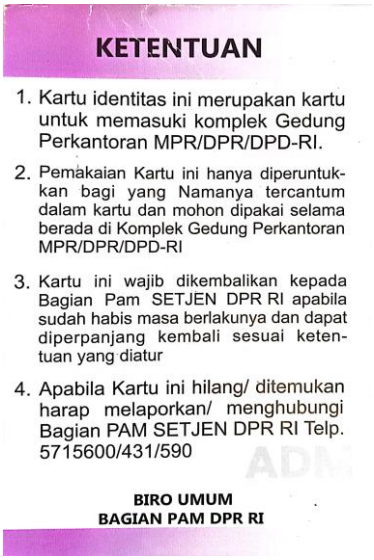
Lampiran 4. Kartu Identitas sebagai Akses Masuk Kantor



SETJEN DPR - RI

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NAMA : AZIZAH .A
PEKERJAAN : MAGANG BAG. FRAKSI..PAN..
BERLAKU S/D : 30..SEPT..2024



KETENTUAN

1. Kartu identitas ini merupakan kartu untuk memasuki komplek Gedung Perkantoran MPR/DPR/DPD-RI.
2. Pemakaian Kartu ini hanya diperuntukkan bagi yang Namanya tercantum dalam kartu dan mohon dipakai selama berada di Komplek Gedung Perkantoran MPR/DPR/DPD-RI
3. Kartu ini wajib dikembalikan kepada Bagian Pam SETJEN DPR RI apabila sudah habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang diatur
4. Apabila Kartu ini hilang/ ditemukan harap melaporkan/ menghubungi Bagian PAM SETJEN DPR RI Telp. 5715600/431/590

BIRO UMUM
BAGIAN PAM DPR RI

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai PPM

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
JL. Jend. Gatot Subroto,Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811

PAN

Nomor : 02.1751/PKPF/F-PAN/DPR RI/IX/2024 09 September 2024
Lampiran : -
Perihal : Menyelesaikan Magang di Fraksi PAN DPR RI

Kepada Yth.
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra
Jakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat, Sekretariat Fraksi PAN DPR RI menerangkan bahwa nama di bawah ini:

No	Nama	Jurusan	Keterangan
1	Sulis Setia Ningsih	Aqidah dan Filsafat Islam	STAI Sadra
2	Azizah Amanuroh	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	STAI Sadra

Telah Menyelesaikan magang di Fraksi PAN DPR RI dari tanggal 08 Juli 2024 sampai tanggal 09 September 2024.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 09 September 2024

a,n Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI
Kepala Sekretariat Fraksi PAN DPR RI

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL * DPR - RI

Suparno
NIP. 196704281992031003

Lampiran 6. Daftar Hadir PPM

No	Hari/ Tanggal	Jam Masuk	Jam Keluar	Paraf Pembimbing Lapangan
1	Senin, 8 Juli 2024	09.37	15.53	
2	Selasa, 9 Juli 2024	09. 16	16.10	
3	Rabu, 10 Juli 2024	09.42	16.40	
4	Kamis, 11 Juli 2024	10.19	14.23	
5	Jumat, 12 Juli 2024	LIBUR		
6	Sabtu, 13 Juli 2024			
7	Minggu, 14 Juli 2024			
8	Senin, 15 Juli 2024	09.56	14.20	
9	Selasa, 16 Juli 2024	10.34	14.27	
10	Rabu, 17 Juli 2024	IZIN		
11	Kamis, 18 Juli 2024	11.05	15.08	
12	Jumat, 19 Juli 2024	LIBUR		
13	Sabtu, 20 Juli 2024			
14	Minggu, 21 Juli 2024			
15	Senin, 22 Juli 2024	11.08	15.29	
16	Selasa, 23 Juli 2024	11.50	16.59	
17	Rabu, 24 Juli 2024	11.31	14.49	
18	Kamis, 25 Juli 2024	09.45	15.57	
19	Jumat, 26 Juli 2024	LIBUR		
20	Sabtu, 27 Juli 2024			
21	Minggu, 28 Juli 2024			
22	Senin, 29 Juli 2024	11.29	16.10	
23	Selasa, 30 Juli 2024	11.04	15.02	
24	Rabu, 31 Juli 2024	11.05	16.48	
25	Kamis, 1 Agustus 2024	11.03	14.10	
26	Jumat, 2 Agustus 2024	LIBUR		
27	Sabtu, 3 Agustus 2024			
28	Minggu, 4 Agustus 2024			
29	Senin, 5 Agustus 2024	11.13	14.39	
30	Selasa, 6 Agustus 2024	10.46	15.06	
31	Rabu, 7 Agustus 2024	11.33	16.45	
32	Kamis, 8 Agustus 2024	12.59	16.31	
33	Jumat, 9 Agustus 2024	LIBUR		
34	Sabtu, 10 Agustus 2024			
35	Minggu, 11 Agustus 2024			
36	Senin, 12 Agustus 2024	11.45	14.30	
37	Selasa, 13 Agustus 2024	12.03	15.27	
38	Rabu, 14 Agustus 2024	10.35	16.24	
39	Kamis, 15 Agustus 2024	11.23	17.35	
40	Jumat, 16 Agustus 2024	LIBUR		
41	Sabtu, 17 Agustus 2024			
42	Minggu, 18 Agustus 2024			
43	Senin, 19 Agustus 2024	10.32	13.35	
44	Selasa, 20 Agustus 2024	10.57	16.12	
45	Rabu, 21 Agustus 2024	11.09	16.12	
46	Kamis, 22 Agustus 2024	10.54	14.52	
47	Jumat, 23 Agustus 2024	LIBUR		
48	Sabtu, 24 Agustus 20224			
49	Minggu, 25 Agustus 2024			
50	Senin, 9 September 2024	12.00	16.00	

Mengetahui,

Pembimbing

Pembimbing Lapangan

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL PAN DPR-RI

Kumarudin M.A

Zacrial Abidin, M.Ud.

Lampiran 7. Lembar Kegiatan PPM

LEMBAR KEGIATAN SEBELUM RESMI MELAKSANAKAN PRAKTIK PROFESI MAHASISWA

Hari/ Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Lapangan
Jumat, 17 Mei 2024	Mengunjungi Gedung MPR RI dan Menemui Ibu Annisa Zakiah, Psb, S.Sos di Gedung Nusantara V untuk Meminta Arahan Terkait Prosesi Masuk Lembaga Magang	
	Mengunjungi Ruang Sekretariat Fraksi PAN Gedung DPR RI untuk Menyerahkan Surat Pengajuan Magang di Fraksi PAN DPR RI	
Kamis, 13 Juni 2024	Mengisi *Google Form* Pengajuan Lembaga Magang	
Rabu, 26 Juni 2024	Menghadiri Diskusi Publik Fraksi PAN DPR RI "Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan" di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI	
	Menjadi Panitia Registrasi dan Konsumsi dalam Kegiatan Diskusi Publik Fraksi PAN DPR RI "Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan" di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI	
	Berfoto Bersama Pembimbing Magang dengan Mahasiswa yang Berstatus Magang dari Universitas AMIKOM Yogyakarta, Mahasiswa Universitas Pancasila dan Alumni Mahasiswa Magang Fraksi PAN	
Jumat, 28 Juni 2024	Menghadiri Kegiatan Pembekalan PPM oleh Manajemen Tesis Bapak Basrir Hamdani, Ph. D	
	Mengisi Google Form Penerimaan di Lembaga Magang	
	Masuk Grup Magang DPR RI	
Kamis,4 Juli 2024	Mengunjungi Museum DPR RI	
	Mengunjungi Ruang Sekretariat Fraksi PAN Gedung DPR RI untuk Menerima Surat Balasan Penerimaan Izin Magang	
	Mengunjungi Pamdal DPR RI Untuk Menyerahkan Surat Permohonan *Identity Card*	
	Mendengarkan RDPU Komisi X DPR RI dengan Forum Guru di Ruang Rapat Komisi X DPR RI	
Jumat, 5 Juli 2024	Mendapatkan Dosen Pembimbing PPM	
	Melaksanakan Bimbingan Pertama Bersama Dosen Pembimbing, Zaenal Abidin, M. Ud. di Kampus STAI Sadra	

Mengetahui,

Pembimbing

Pembimbing Lapangan

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL PAN DPR-RI

Kumaruddin M.A

Zaenal Abidin, M.Ud.

LEMBAR KEGIATAN HARIAN
PELAKSANAAN PRAKTIK PROFESI MAHASISWA (PPM)

Hari, Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Lapangan
Senin, 8 Juli 2024	Pengenalan Praktik Magang dengan Pembimbing di Lembaga yakni Bapak Kumarudin, M.A bersama Seluruh Mahasiswa dari Berbagai Kampus yang Berstatus Magang Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Kaitan Profesi Magang dengan Program Studi Minat Mahasiswa	
Selasa, 9 Juli 2024	Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Pansus Diskusi bersama Bapak Yusron Terkait Peraturan Perundang-undangan	
Rabu, 10 Juli 2024	Mengunjungi Perpustakaan DPR RI Diskusi Publik Webinar dengan Tema "Mewujudkan Fraksi PAN yang Sensitif Gender", yang Diinisiasi dan Kerja Sama TA Fraksi PAN DPR RI dan Mahasiswa magang AMIKOM Yogyakarta.	
Kamis, 11 Juli 2024	Mengambil *Identity Card* di Kantor Pamdal DPR RI Mendengarkan Audiensi antara Puan PAN Ibu Dessy Ratnasari dari Komisi X dan Delegasi Kampus Institut Pangeran (Indramayu) terkait "*Education and Academic Budget for Private University*"	
Minggu, 14 Juli 2024	Melaksanakan Bimbingan Kedua Bersama Dosen Pembimbing Ustaz Zaenal Abidin, M.Ud di Asrama Putri	
Senin, 15 Juli 2024	Membaca Buku Panduan PPM STAI Sadra Mengunjungi Laman DPR RI dan Fokus Membaca Tugas Komisi VI, IX, dan X serta Mitra Kerja Komisi-komisi Tersebut	
Selasa, 16 Juli 2024	Diskusi Lintas Jurusan bersama Mahasiswa dari Kampus Lain yang Berstatus Magang (UIN Semarang, Universitas Veteran, dan Universitas Pancasila) Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Indonesia Emas 2045	
Rabu, 17 Juli 2024	Izin Tidak Masuk Kantor dengan Alasan Mengikuti Kegiatan Komunitas	
Kamis, 18 Juli 2024	Membaca Buku Panduan PPM STAI Sadra Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Hubungan Pancasila dengan Al-Qur'an dan Teori Pemisahan Kekuasaan	
Senin, 22 Juli 2024	Membaca Sejarah Berdirinya DPR RI Mengunjungi Kandang Rusa dan Kantin Pujasera DPR RI	
Selasa, 23 Juli 2024	Diskusi bersama Bapak Kumarudin, M.A dan Mahasiswa yang Berstatus Magang dengan Lingkup Pembahasan Kaitan Kasus-kasus Terkini	

	dengan Ayat-ayat Al-Qur'an	
	Menyimak Presentasi Akhir Magang Mahasiswa Kampus AMIKOM Yogyakarta terkait Analisis Isu Pemberian Izin Ormas Keagamaan dalam Mengelola Tambang	
Rabu, 24 Juli 2024	Mengunjungi Perpustakaan DPR RI	
	Menyusun Data Kegiatan Sementara Selama Dua Minggu Magang di DPR RI	
Kamis, 25 Juli 2024	Menyusun Data Absensi Sementara Selama Dua Minggu Magang di DPR RI	
	Menyimak Presentasi Akhir Magang Mahasiswa Kampus UPN VETERAN terkait Pembahasan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI pada Tanggal 01, 03, dan 09 Juli 2024	
Senin, 29 Juli 2024	Menyusun Laporan Sementara	
	Mengunjungi *Roof Top* DPR RI	
Selasa, 30 Juli 2024	Menyimak Presentasi Mahasiswa UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNES) dengan Tema Nasib Guru yang Berstatus P1	
	Diskusi Bersama Bapak Kumarudin, M.A dengan Mahasiswa yang Berstatus Magang terkait UUP3	
	Melaksanakan Bimbingan Ketiga Bersama Dosen Pembimbing Ustaz Zaenal Abidin, M.Ud di Asrama Putri	
Rabu, 31 Juli 2024	Menjadi Petugas Operator Presentasi	
	Menyimak Presentasi Akhir Magang dari Mahasiswa UIN Semarang dengan Tema Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	
	Menyimak Presentasi Akhir Magang dari Mahasiswa UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) dengan Tema Pembahasan "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Aturan Hukum Indonesia"	
Kamis, 1 Agustus 2024	Diskusi Umum	
Senin, 5 Agustus 2024	Diskusi Umum	
Selasa, 6 Agustus 2024	Menyaksikan Rapat Pleno Pembahasan RUU yang akan di-*Carry Over* kepada Anggota DPR RI 2024-2029 melalui *Channel Youtube* Resmi DPR RI	
	Diskusi Umum	
Rabu, 7 Agustus 2024	Diskusi Umum	
Kamis, 8 Agustus 2024	bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Analisis RUU	
	Mengunjungi Museum DPR RI dan Gedung Nusantara	
Senin, 12 Agustus 2024	Diskusi singkat bersama Bapak Kumarudin, M.A terkait Analisis Kasus yang akan Diangkat di Presentasi Akhir Mahasiswa Magang	
Selasa, 13 Agustus 2024	Diskusi Umum	
Rabu, 14 Agustus 2024	Mengamati Jalannya Rapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-Fraksi DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)	

Kamis, 15 Agustus 2024	Mengamati Jalannya Rapat Lanjutan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-Fraksi DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)	
Senin, 19 Agustus 2024	Diskusi Umum bersama Mahasiswa di F-PAN yang Berstatus Magang	
Selasa, 20 Agustus 2024	Mengamati Jalannya Sidang Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025	
	RDPU Komisi VIII DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Indonesia: Menerima Masukan Terkait Permasalahan Pekerja dan Pensiunan di RS Haji Jakarta	
	RDPU Komisi X DPR RI Terkait Pembiayaan Pendidikan bersama *Indonesia Corruption watch* (ICW)	
Rabu, 21 Agustus 2024	Rapat Panja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terkait putusan MA Terkait Batasan Usia Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Baleg	
	Menyimak Rapat Pansus Haji DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penyelenggraan Haji dan Umrah Kemenag RI melalui *Channel YouTube* Resmi DPR RI	
Kamis, 22 Agustus 2024	RDP KOMISI XI DPR RI dengan Kepala BPKP, Kepala LKPP, PLT Kepala BPS, dan SEKJEN BPK RI Pembahasan Laporan Keuangan BPKP, LKPP, BPS, dan BPK dalam APBN TA 2023	
Senin, 9 September 2024	Melaksanakan Presentasi Akhir Magang sebagai syarat mendapatkan surat keterangan selesai, sertifikat magang dan penilaian lembaga.	

Mengetahui,

Pembimbing Lapangan

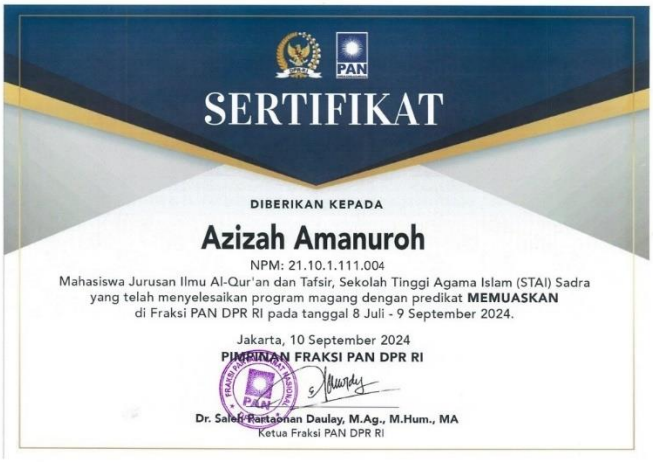
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
PAN
DPR-RI

Kumaruddin M.A

Pembimbing

Zaenal Abidin, M.Ud.

Lampiran 8. Sertifikat PPM



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Azizah Amanuroh

NPM: 21.10.1.111.004

Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra yang telah menyelesaikan program magang dengan predikat **MEMUASKAN** di Fraksi PAN DPR RI pada tanggal 8 Juli - 9 September 2024.

Jakarta, 10 September 2024

PIMPINAN FRAKSI PAN DPR RI

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA

Ketua Fraksi PAN DPR RI

Lampiran 9. Jadwal Waktu

NO	KEGIATAN	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	AGST 2024	SEP 2024
1	Menghubungi Perantara Lembaga Tujuan PPM					
2	Menyerahkan Surat Permohonan PPM					
3	Mengikuti Kegiatan Sebelum Resmi Magang					
4	Pelaksanaan PPM					
5	Penulisan Laporan PPM					
6	Koreksi Laporan PPM					
7	Penyerahan Koreksi Laporan PPM					
8	Sidang PPM					

Lampiran 10. Foto Kegiatan PPM di DPR RI













Lampiran 11. Lembar Bimbingan PPM

Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra (STAI)

Jl. Lebak Bulus 2 No. 2 Jakarta Selatan 12430

Phone : (6221) 2944640. Fax. (6221) 29235438. Web: www.sadra.ac.id. E-mail: stfi.sadra12@gmail.com

BUKU BIMBINGAN PPM

Nama : Azizah Amanuroh

NIM : 21.10.1.111.004

Tema PPM : DINAMIKA POLITIK DPR RI DALAM PERSPEKTIF ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

Nama Lembaga :

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Tahun : 2023/2024

Pembimbing : Zaenal Abidin, M.Ud.

Thesis Management

NO	TANGGAL	TEMA	URAIAN	TTD PEMBIMBING
1	Jumat, 28/6/24	Persiapan Pelaksanaan PPM	- Arahan dan motivasi dari pembimbing sebelum pelaksanaan PPM - Tahap penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama PPM	
2	Minggu, 14/7/24	Menjisi Kegiatan Saat Reses	- Bagaimana strategi memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan produktif di masa reses - Arahan pembimbing untuk mencatat poin kegiatan	
3	Selasa, 30/7/24	Tahap Persiapan Penyusunan Laporan PPM	- Arahan pembimbing untuk mulai menyusun laporan PPM - Masukan Pembimbing terkait kegiatan yang dilaksanakan dan evaluasinya.	
4	Senin, 5/8/24	Tahap Penyusunan Laporan PPM	- Mengirimkan laporan sementara untuk di berikan masukan - Pengajuan judul Laporan PPM	
5	Selasa, 8/8/24	Permohonan Paraf	- meminta paraf pembimbing sebagai syarat pendaftaran sidang PPM	
6	Kamis, 5/8/24	Kunjungan Pembimbing	Pembimbing Mengunjungi lembaga tempat Peserta melaksanakan PPM untuk meminta menyerahkan presentasi dan memberi masukan & Tahap selesai PPM	